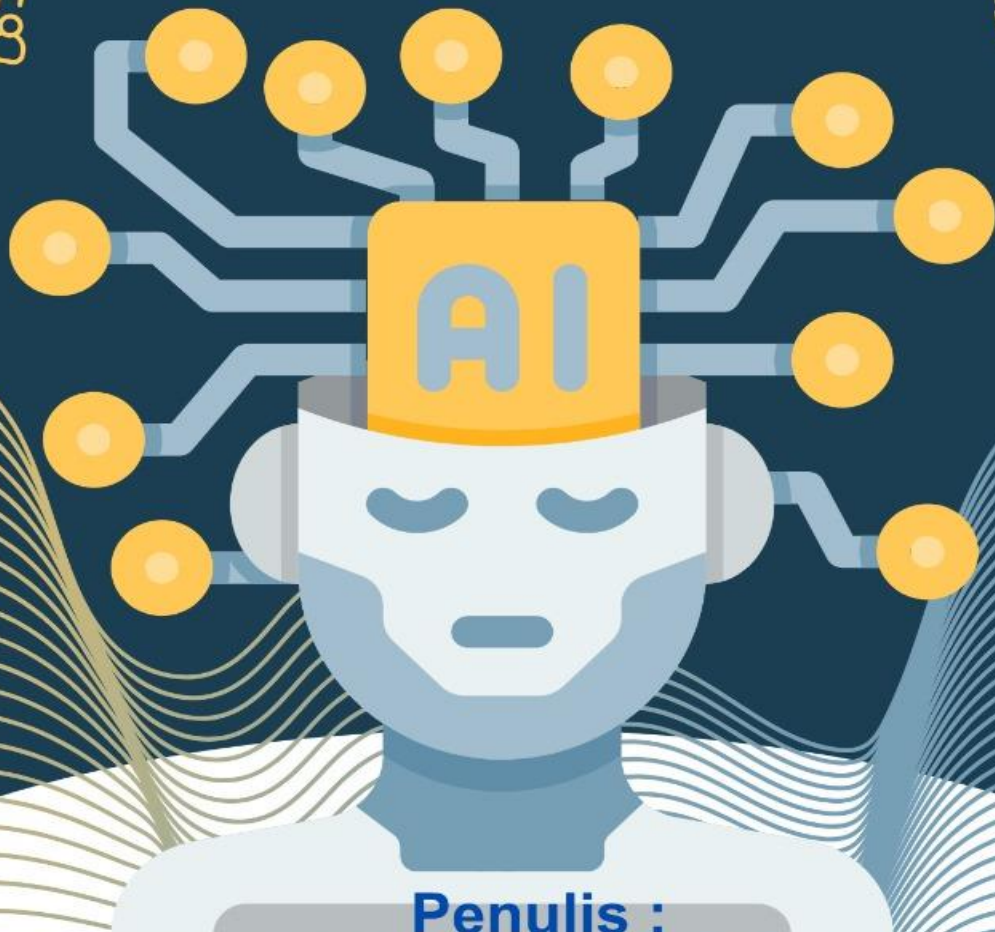


AGAMA , AI DAN PLURALISME

Agama sebagai Simbol Kelompok dan
Potensi AI dalam Memahami dan
Mempromosikan Pluralisme



Penulis :

Dharma Leksana, S.Th., M.Sl.

AGAMA, AI DAN PLURALISME

Agama sebagai Simbol Kelompok dan Potensi AI dalam Memahami dan Mempromosikan Pluralisme

Oleh : Dharma Leksana, S.Th., M.Si.

Kata Pengantar

Daftar Isi

Bab 1 – Pendahuluan: Agama di Persimpangan Zaman

- Pergeseran Lanskap: Dari Ruang Sakral ke Ruang Digital
- Dilema Abad ke-21: Agama sebagai Sumber Konflik dan Harapan
- AI sebagai Katalisator: Sebuah Peluang Baru
- Struktur Buku: Peta Jalan Menuju Pluralisme Digital

Bab 2 – Agama sebagai Simbol Kelompok: Sebuah Pergeseran Makna

- Makna dalam Simbol: Perspektif **Peter L. Berger** dan **Clifford Geertz**
- Dari Etika ke Identitas: Ketika Agama Menjadi "Marker" Kelompok
- Politik Populis dan Instrumentalitas Simbol Agama
- Kasus-kasus Global: Populisme Berbasis Agama di Berbagai Negara

Bab 3 – Erosi Etika Publik dan Politik Identitas

- Apa Itu Etika Publik?: Ajaran **Jürgen Habermas** dan Ruang Publik Rasional
- Ancaman dari Dalam: Politik Identitas sebagai Penyakit Sosial
- Studi Perbandingan: Post-religious Ethics di Negara Nordik vs. Tantangan Negara Berkembang
- Ketika Agama dan Kekuasaan Melebur: Dampak terhadap Tatahan Sipil

Bab 4 – Pluralisme sebagai Etika Publik: Perspektif Filsafat dan Sosiologi

- Keadilan sebagai Kesetaraan: Gagasan **John Rawls** tentang Masyarakat Plural
- Etika Tanggung Jawab: Pertemuan dengan "Yang Lain" menurut **Emmanuel Levinas**
- Risiko Modernitas: Analisis **Anthony Giddens** tentang Ketidakpastian Sosial dan Kepercayaan
- Martabat Manusia Universal: Fondasi Etika Lintas Iman

Bab 5 – AI dan Pluralisme: Perspektif Teknologi yang Etis

- AI sebagai Cermin Nalar Kolektif: Wawasan **Yuval Noah Harari** dan **Luciano Floridi**
- Bahaya Bias Algoritma: Ketika AI Mencerminkan Prasangka Manusia
- **Etika Algoritmik**: Mendesain Kecerdasan Buatan yang Adil
- Desain Pluralistik: Membangun AI untuk Dunia yang Beragam

Bab 6 – Spiritualitas Personal vs. Identitas Komunal

- Pengalaman Esoterik: Spiritualitas menurut **Paul Tillich** dan **Karen Armstrong**
- Kerinduan akan Makna: Melampaui Dogma dan Ritual Kelompok
- Peran AI dalam Pembinaan Spiritual: Dari Chatbot hingga Platform Meditatif
- Otonomi Spiritual di Era Digital: Peluang dan Risiko

Bab 7 – AI, Agama, dan Nilai Universal: Memetakan Kecerdasan Etika

- Basis Pengetahuan Lintas Agama: Potensi AI dalam Membaca dan Menganalisis Kitab Suci
- Dari Kode Moral ke Kecerdasan Moral: Akankah Mesin Mampu Berempati?
- Moderasi Konten: Peran AI dalam Mencegah Ekstremisme dan Hoax Keagamaan
- Tantangan Etika Mesin: Mengatasi Distorsi dan Disinformasi Teologis

Bab 8 – Kasus Indonesia: Intoleransi dan Kebebasan Beragama

- **Studi Kasus 1: GKI Yasmin** – Pergumulan Hak Beribadah di Bogor
- **Studi Kasus 2: Ahmadiyah** – Persekusi dan Diskriminasi Berbasis Fatwa
- **Studi Kasus 3: Syiah** – Kekerasan Kolektif dan Pembiaran Aparat di Sampang
- **Studi Kasus 4: Penghayat Kepercayaan** – Perjuangan Pengakuan dan Hak Sipil
- Analisis Peran Aparat, Perda Intoleran, dan Peraturan Bersama Menteri (PBM)

Bab 9 – Bhinneka Tunggal Ika dan Tantangan Negara Plural

- Filosofi Persatuan: Makna dan Sejarah **Bhinneka Tunggal Ika**
- Multikulturalisme vs. Nasionalisme Eksklusif: Dua Kutub yang Saling Berhadapan
- Sistem Pendidikan: Peran Pendidikan Agama dan Kewarganegaraan
- Peran Ormas: Antara Penjaga Toleransi dan Penyebar Intoleransi

Bab 10 – Peluang AI untuk Pendidikan, Mediasi, dan Toleransi Antaragama

- AI untuk Edukasi: VR Interaktif dan Platform Pembelajaran Toleransi
- Big Data dan Pemetaan Sentimen: Mengukur dan Memahami Dinamika Keagamaan
- Mediasi Konflik Daring: AI sebagai Fasilitator Dialog Lintas Iman
- Penguatan Literasi Digital: Memerangi Hoax dan Narasi Kebencian

Bab 11 – Paradigma Baru: Agama sebagai Sumber Etika, Bukan Alat Identitas

- Revitalisasi Pengajaran Agama: Kembali ke Fondasi Moral dan Kasih
- Spiritualitas Intim: Menemukan Kedamaian dan Solidaritas dari Dalam
- Etika Bersama: Syarat Terwujudnya Masyarakat Plural
- Seruan untuk Aksi: Rekonsiliasi Teologi dan Teknologi

Bab 12 – Penutup: Menuju Etika Publik dan Spiritualitas Esensial

- Visi Masa Depan: Komunitas Spiritual Digital yang Inklusif
- Rekonsiliasi Agama dan AI: Dua Mitra Etis untuk Kemanusiaan
- Seruan kepada Akademisi, Pemimpin Agama, dan Teknolog

Daftar Pustaka

Glosarium

Kata Pengantar

Latar Belakang dan Urgensi: Mengapa Memahami Agama sebagai Simbol Kelompok Penting di Era Digital

Agama, secara historis, telah menjadi fondasi yang mendalam bagi makna dan kohesi sosial dalam masyarakat manusia. Ia menyediakan kerangka kerja yang komprehensif untuk memahami dunia, membedakan antara yang sakral dan profan, serta membangun "kosmos sakral" yang memberikan keteraturan dan stabilitas hidup.¹ Fungsi fundamental ini memungkinkan individu untuk menemukan tempat mereka dalam masyarakat yang lebih luas, mengurangi kecemasan, dan memberikan arah serta tujuan.¹ Namun, di era kontemporer, terutama dengan dinamika politik identitas dan lanskap digital yang berkembang pesat, fungsi agama seringkali mengalami pergeseran signifikan. Agama kini semakin banyak berfungsi sebagai penanda identitas kelompok yang kuat, yang, meskipun dapat memperkuat solidaritas internal, juga berpotensi memicu intoleransi dan polarisasi.

Pergeseran ini terlihat jelas di banyak negara, di mana afiliasi agama menjadi penanda perbedaan yang menonjol, kerap dimanfaatkan oleh aktor politik populis dan kelompok-kelompok tertentu untuk menggalang dukungan.³ Narasi "kami" versus "mereka" seringkali menjadi inti dari diskursus ini, di mana agama digunakan untuk mendefinisikan kelompok yang "benar" atau "asli" yang diklaim terancam oleh "elit" atau "pihak lain".⁴

Hal ini dapat mengaburkan batas antara keyakinan spiritual dan agenda politik, memicu konflik yang merusak kohesi sosial. Oleh karena itu, memahami peran ganda agama—sebagai kekuatan pemersatu sekaligus pemecah—menjadi sangat mendesak, terutama di negara pluralistik seperti Indonesia.

Dalam konteks ini, muncul potensi Kecerdasan Buatan (AI) sebagai alat baru yang dapat membantu menganalisis, memahami, dan bahkan mempromosikan pluralisme. AI menawarkan kemampuan untuk memproses dan menganalisis data dalam skala besar, mengungkap pola dan koneksi yang mungkin luput dari pengamatan manusia.

Namun, pemanfaatan AI juga disertai dengan tantangan etisnya sendiri, yang memerlukan pertimbangan cermat agar teknologi ini tidak justru memperburuk bias atau menciptakan bentuk diskriminasi baru.

Tujuan dan Ruang Lingkup Buku

Buku ini bertujuan untuk memberikan kerangka teoretis yang komprehensif dalam memahami agama sebagai konstruksi sosial dan simbol kelompok. Buku ini akan menganalisis studi kasus intoleransi agama di Indonesia secara mendalam untuk mengidentifikasi pola dan akar masalah yang mendasarinya. Selanjutnya, Buku ini akan mengeksplorasi potensi dan tantangan etis AI dalam konteks pemahaman dan promosi pluralisme. Akhirnya, Buku ini akan merumuskan rekomendasi kebijakan dan aksi komunitas yang dapat memperkuat pluralisme beragama di era digital, dengan harapan dapat berkontribusi pada masyarakat yang lebih harmonis dan inklusif.

Bagian I

Agama sebagai Konstruksi Sosial dan Simbol Identitas Kelompok

Memahami Agama melalui Lensa Sosiologi: Peter L. Berger dan Clifford Geertz

Studi sosiologi agama menawarkan kerangka kerja yang kuat untuk memahami bagaimana agama tidak hanya membentuk keyakinan individu, tetapi juga berfungsi sebagai kekuatan sosial yang fundamental. Dua pemikir terkemuka, Peter L. Berger dan Clifford Geertz, memberikan perspektif yang saling melengkapi tentang peran agama sebagai konstruksi sosial dan sistem simbol.

Peter L. Berger: Konsep "Kosmos Sakral" dan Diferensiasi Sakral-Profan

Peter L. Berger, terutama melalui karyanya "The Sacred Canopy," mengemukakan bahwa agama adalah "usaha manusia untuk membangun kosmos sakral".² Bagi Berger, agama melampaui sekadar kumpulan praktik, ritual, atau kepercayaan; ia adalah konstruksi sosial yang esensial untuk mengorganisir kehidupan manusia dengan membedakan secara tegas antara yang sakral dan yang profan.¹ Yang "sakral" merujuk pada segala sesuatu yang dipisahkan, diresapi dengan rasa kekaguman, penghormatan, dan signifikansi, seringkali terkait dengan entitas ilahi, teks suci, ritual, dan simbol.¹ Sementara itu, yang "profan" adalah ranah keseharian, yang tidak memiliki makna transenden yang sama.

Konsep "kosmos sakral" yang dikemukakan Berger menjelaskan bagaimana agama menciptakan alam semesta yang bermakna dan teratur, yang mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang eksistensi manusia.¹ Dalam pandangan dunia religius, kosmos sakral menawarkan rasa stabilitas, arah, dan tujuan, mengubah dunia yang kacau menjadi tempat yang teratur dengan perbedaan yang jelas antara baik dan jahat, sakral dan profan, hidup dan mati.¹ Fungsi utama agama, menurut Berger, adalah mengurangi kecemasan dan memberikan makna tidak hanya pada tingkat individu tetapi juga untuk kohesi sosial yang lebih luas.¹ Agama, dalam pandangannya, adalah fenomena kolektif yang dihasilkan dari interaksi sosial dan pemahaman bersama, membentuk pandangan dunia individu dan masyarakat secara keseluruhan melalui proses dialektis eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi.¹ Berger menolak pandangan reduksionis,

sebaliknya menekankan kekuatan agama dalam menstrukturkan pandangan dunia individu dan menyediakan "kanopi sakral" yang mencakup seluruh eksistensi manusia, menjawab pertanyaan-pertanyaan eksistensial yang tidak dapat diatasi oleh institusi sosial lainnya.¹

Pemahaman Berger tentang agama sebagai "kosmos sakral" dan "konstruksi sosial" menunjukkan bahwa agama lebih dari sekadar seperangkat keyakinan; ia menyediakan kerangka fundamental di mana manusia memahami dunia yang kacau, menciptakan keteraturan, makna, dan kohesi sosial. Fungsi eksistensial yang mendalam ini berarti agama bukan hanya bagian dari masyarakat; ia merupakan fondasi bagaimana masyarakat membangun realitasnya. Karena agama memiliki kekuatan fundamental untuk mendefinisikan realitas dan memberikan makna, ia menjadi sangat rentan terhadap instrumentalisasi. Mengontrol narasi keagamaan berarti mengontrol realitas sosial dan identitas kolektif, menjadikannya alat yang sangat ampuh untuk mobilisasi kelompok dan politik.

Clifford Geertz: Agama sebagai Sistem Simbol dan Makna Budaya

Clifford Geertz, seorang antropolog terkemuka, melihat agama sebagai "sistem simbol yang berfungsi untuk membangun suasana hati dan motivasi yang kuat, meresap, dan tahan lama pada manusia dengan merumuskan konsepsi tentang tatanan umum keberadaan dan melapisi konsepsi ini dengan aura faktualitas".⁷ Bagi Geertz, budaya adalah "pola makna yang ditransmisikan secara historis yang diwujudkan dalam simbol-simbol," dan agama adalah bagian integral dari sistem budaya ini.⁸

Simbol, dalam definisi Geertz, adalah "objek, tindakan, peristiwa, kualitas, atau hubungan apa pun yang berfungsi sebagai kendaraan untuk sebuah konsepsi"; konsepsi inilah yang menjadi "makna" simbol.⁸ Contohnya termasuk kitab suci, ritual, atau bahkan kata-kata seperti "Tuhan".⁸ Sistem simbol keagamaan membentuk pandangan dunia yang mencakup asumsi-asumsi yang tidak dipertanyakan tentang dunia dan cara kerjanya.⁸ Ketika penganut agama bertindak bersama, mereka mulai menerima interpretasi simbolis kelompok tentang dunia seolah-olah itu nyata, merasa bahwa mereka berpartisipasi secara bermakna dalam alam semesta yang dapat dipahami.⁸ Agama melapisi konsepsinya dengan "aura faktualitas" dengan menyajikan konsepsi realitas mereka secara menarik dan persuasif, sehingga simbol-simbol tersebut tampak sangat nyata dan faktual bagi penganutnya.⁸

Fokus Geertz pada simbol menjelaskan bagaimana agama menciptakan "aura faktualitas" dan menanamkan "suasana hati dan motivasi yang kuat, meresap, dan tahan lama." Simbol-simbol ini tidak acak; mereka mewujudkan makna bersama dan asumsi yang tidak dipertanyakan tentang dunia. Ketika individu bertindak bersama dalam kerangka keagamaan, mereka secara kolektif menerima interpretasi simbolis ini sebagai nyata. Kemampuan agama untuk menanamkan suasana

hati dan motivasi yang mendalam melalui simbol menjadikannya instrumen yang sangat efektif untuk membentuk identitas kelompok yang kuat. Simbol-simbol ini dapat dengan mudah digunakan untuk membedakan "kita" dari "mereka," karena mereka menciptakan rasa kepemilikan dan kebenaran yang unik bagi kelompok penganut, yang dapat menjadi dasar bagi solidaritas internal tetapi juga eksklusivisme eksternal.

Tabel: Perbandingan Teori Agama sebagai Simbol (Berger vs. Geertz)

Aspek	Peter L. Berger	Clifford Geertz
Teori	Sosiologi Agama	Antropologi Budaya
Konsep Kunci	Kosmos Sakral, Sakral/Profan, Pembangunan Dunia (World-building)	Sistem Simbol, Sistem Budaya, Aura Faktualitas
Fokus Utama	Konstruksi sosial realitas, penciptaan makna, kohesi masyarakat	Penciptaan makna melalui simbol, pembentukan pandangan dunia dan motivasi
Implikasi terhadap Identitas Kelompok	Agama sebagai kerangka realitas bersama dan tatanan sosial yang mengikat individu dalam kolektivitas.	Agama sebagai sumber makna dan motivasi bersama yang membentuk identitas unik suatu kelompok.

Tabel ini secara ringkas merangkum kontribusi fundamental Berger dan Geertz. Dengan menempatkan kedua teori berdampingan, pembaca dapat dengan cepat memahami perbedaan dan kesamaan dalam pendekatan mereka untuk memahami agama sebagai fenomena sosial dan simbolis. Perbandingan ini membantu membangun dasar teoretis yang kuat tentang mengapa agama begitu ampuh sebagai penanda identitas kelompok, menyediakan kerangka konseptual yang jelas sebelum menyelami instrumentalisasinya.

Pergeseran Fungsi Agama: Dari Etika ke Penanda Loyalitas Kelompok

Seiring waktu dan perubahan sosial, fungsi agama dapat bergeser dari penekanan pada etika dan panduan moral universal menjadi penanda utama loyalitas kelompok. Pergeseran ini memiliki implikasi serius terhadap kohesi sosial dan etika publik.

Instrumentalisasi Agama dalam Politik Identitas dan Nasionalisme Religius

Di banyak negara, agama telah menjadi penanda perbedaan dan identitas kelompok yang kuat, seringkali dimanfaatkan oleh aktor politik populis sayap kanan dan kelompok Kristen-kanan baru.³ Narasi "kami" dan "mereka" menjadi inti dari diskursus ini, di mana agama digunakan untuk mendefinisikan "rakyat" yang homogen dan berbudi luhur yang diklaim terancam oleh "elit" dan "pihak lain" yang berbahaya, seperti imigran dan Muslim, terutama pasca 9/11.⁴ Ini seringkali disertai dengan penggabungan radikalisme agama dengan radikalisme politik, di mana praktik kesalehan konservatif disamakan dengan pandangan politik radikal, mengabaikan nuansa teologis demi tujuan politik.⁴

Secara historis, sosiolog Emile Durkheim telah mengamati pergeseran dari fungsi agama yang berpusat pada etika dan psikologi ke penggunaan simbol sakral untuk memberikan otoritas pada aspek-aspek duniawi agama.¹¹ Dalam konteks politik, negara sering membentuk aliansi dengan agama dalam upaya untuk meningkatkan stabilitas politik melalui dukungan yang lebih besar, kontrol yang lebih efektif terhadap agama dominan, dan kepatuhan ideologis yang meningkat.¹² Sebagai imbalannya, otoritas agama sering menerima kursi di meja tawar-menawar politik, yang memungkinkan mereka untuk memengaruhi kebijakan, seperti penindasan agama saingan atau penegakan hukum agama tertentu.¹³

Ketika agama, yang secara inheren memiliki kapasitas untuk membentuk etika universal (seperti yang diisyaratkan Durkheim), dialihkan fungsinya menjadi penanda identitas kelompok, ia menjadi alat yang ampuh untuk politik "kami versus mereka." Ini merupakan pergeseran dari fungsi normatif agama (membimbing perilaku moral) ke fungsi instrumental (mengkonsolidasi kekuasaan dan memobilisasi pendukung). Otoritas agama seringkali mendapatkan keuntungan politik (pengaruh kebijakan) dari aliansi ini, yang semakin mengikat agama pada agenda politik tertentu. Pergeseran ini mengikis kapasitas agama untuk berfungsi sebagai penuntun moral yang independen dan universal. Etika agama menjadi subordinat terhadap tujuan politik kelompok, yang pada gilirannya dapat membenarkan diskriminasi dan intoleransi terhadap "yang lain."

Dampak pada Etika Publik dan Kohesi Sosial

Instrumentalisasi agama berkontribusi pada erosi etika publik, di mana politik identitas digunakan untuk membungkam debat, mendiskreditkan individu, atau mengalihkan perhatian dari isu-isu substantif.¹⁵ Norma akuntabilitas dan diskursus rasional terkikis, karena tuduhan berbasis identitas (misalnya, "rasis," "transfobia") menjadi senjata untuk menghindari kritik, bahkan ketika kritik tersebut sah.¹⁵ Media sosial memperkuat pembagian dan disinformasi yang penuh kebencian, menciptakan "ruang gema" yang mempercepat polarisasi, di mana informasi bias menyebar lebih cepat daripada kebenaran.¹⁵

Ketika kelompok merasa terancam, mereka cenderung kembali ke "tribalisme," memperkuat identitas sempit dan memusuhi kelompok lain, seringkali dengan dehumanisasi.¹⁶ Politik identitas juga berkorelasi erat dengan kesenjangan ekonomi, di mana kelompok-kelompok yang diuntungkan dari ketidakadilan mempertahankan keuntungan mereka dengan mengorbankan kelompok yang kurang beruntung, menciptakan lingkaran setan ketidaksetaraan.¹⁸

Yang menarik, penelitian menunjukkan bahwa banyak kaum muda meninggalkan agama institusional bukan karena mereka kehilangan spiritualitas, melainkan karena mereka merasa terputus dari nilai-nilai pribadi mereka, seperti otonomi individu, keaslian, dan keadilan sosial, yang tidak sejalan dengan ajaran atau praktik organisasi keagamaan yang mereka anggap menghakimi, munafik, atau tidak relevan.¹⁹ Hal ini menunjukkan adanya "religiusitas defensif" di kalangan kelompok agama yang merasa nilai-nilai mereka terancam oleh sekularisasi dan modernisasi.²⁰

Instrumentalisasi agama untuk loyalitas politik mengarah pada persenjataan politik identitas. Persenjataan ini, yang diperkuat oleh media digital, secara langsung merusak etika publik dengan menekan perbedaan pendapat, mengikis akuntabilitas, dan menggantikan diskursus rasional dengan serangan pribadi. Hal ini, pada gilirannya, memicu "religiusitas defensif" dan kembalinya ke tribalisme, di mana kelompok merasa terancam dan memperkuat identitas sempit mereka. Konsekuensinya adalah penurunan kepatuhan agama institusional bagi mereka yang mencari pemenuhan etis dan spiritual sejati, semakin memecah belah masyarakat dan menciptakan lingkaran setan di mana potensi etis agama berkurang, dan kekuatan simbolisnya semakin disalahgunakan untuk tujuan memecah belah. Ini menciptakan lingkaran setan di mana agama kehilangan kredibilitas etisnya di mata sebagian masyarakat, sementara pada saat yang sama, ia menjadi lebih kuat sebagai pemicu konflik identitas. Ini adalah tantangan besar bagi kohesi sosial dan demokrasi, karena fondasi moral bersama terkikis.

Bagian II:

Modernitas, Pluralisme, dan Lanskap Keagamaan Kontemporer

Modernitas telah mengubah lanskap sosial, budaya, dan keagamaan secara fundamental. Perubahan ini membawa serta dilema baru, termasuk munculnya masyarakat risiko dan respons yang kompleks dari agama, yang pada gilirannya memunculkan kebutuhan akan kerangka kerja untuk pluralisme.

Dilema Modernitas dan Masyarakat Risiko

Modernitas, sebagai bentuk kehidupan sosial yang muncul di Eropa sejak abad ke-17 dan menyebar ke seluruh dunia, ditandai oleh dinamisme yang luar biasa, pengikisan kebiasaan tradisional, dan dampak global yang mendalam.²¹ Anthony Giddens mengidentifikasi tiga aspek penting yang mendorong dinamisme modernitas: *distanciation* (pemisahan waktu dan ruang, di mana interaksi sosial tidak lagi terikat pada lokasi fisik tertentu), *disembedding* (pengangkatan interaksi sosial dari konteks lokal, memungkinkan hubungan sosial melintasi batas geografis), dan *reflexivity* (kemampuan masyarakat untuk secara terus-menerus memeriksa dan mengubah dirinya sendiri berdasarkan pengetahuan baru).²³

Anthony Giddens: Modernitas, Disembedding, dan Refleksivitas

Dalam pandangan Giddens, modernitas tidak hanya mengubah struktur sosial tetapi juga secara radikal mengubah sifat kehidupan sehari-hari dan aspek paling personal dari aktivitas manusia.²² Salah satu konsekuensi penting dari modernitas adalah munculnya "masyarakat risiko." Giddens membedakan antara "risiko eksternal" (seperti bencana alam) yang selalu ada dalam sejarah manusia, dan "risiko manufaktur" (seperti polusi, penyakit baru, kejahatan) yang merupakan hasil langsung dari proses modernisasi itu sendiri.²⁴ Risiko manufaktur ini, yang diciptakan oleh aktivitas manusia, menimbulkan tingkat ketidakpastian dan kecemasan yang baru.

Meskipun refleksivitas memungkinkan masyarakat untuk menilai tingkat risiko yang dihasilkan dan mengubah aktivitas yang direncanakan, hal ini juga dapat menyebabkan ketidakpercayaan publik terhadap industri, pemerintah, dan ahli, seperti yang terlihat setelah bencana seperti Chernobyl.²⁴ Ketidakpastian dan kebutuhan akan penilaian diri yang konstan dalam modernitas ini menciptakan kekosongan akan kepastian dan makna yang stabil.

Giddens berpendapat bahwa modernitas, melalui dinamismenya yang melekat (*distanciation*, *disembedding*, *refleksivitas*), secara fundamental mengubah kehidupan sosial dan menghasilkan "risiko manufaktur." Risiko buatan manusia ini menciptakan bentuk-bentuk ketidakpastian dan kecemasan baru, yang mengarah pada penurunan kepercayaan publik terhadap institusi. Ketidakstabilan yang melekat dan kebutuhan konstan untuk penilaian diri dalam modernitas ini menciptakan kekosongan akan kepastian dan makna yang stabil. Pencarian kepastian di tengah ketidakpastian modernitas ini seringkali mendorong individu dan kelompok untuk kembali mencari "kanopi sakral" (konsep Berger) atau "narasi besar" yang kokoh. Hal ini menjelaskan mengapa, meskipun ada tren sekularisasi, fundamentalisme agama dapat muncul sebagai respons yang menarik, menawarkan rasa aman dan kebenaran dalam dunia yang semakin kompleks dan tidak terduga.

Respons Fundamentalisme Religius

Fundamentalisme agama dapat dipahami sebagai respons terhadap modernisasi dan globalisasi, ditandai dengan interpretasi literal teks-teks suci dan penekanan pada nilai-nilai tradisional.²⁵ Anthony Giddens dan Steve Bruce melihat fundamentalisme sebagai bentuk pertahanan terhadap ancaman yang dirasakan terhadap struktur sosial dan nilai-nilai tradisional, dengan fundamentalisme komunal lebih sering muncul di masyarakat kurang berkembang dan fundamentalisme individualis di masyarakat yang lebih maju.²⁵

Fundamentalisme menawarkan rasa kepastian dalam dunia yang semakin kompleks dan saling terhubung, memberikan rasa aman dan keamanan bagi penganutnya yang mungkin merasa terombang-ambing oleh perubahan modern.²⁵ Ini adalah "narasi besar" yang menyerang postmodernitas—yang menentang otoritas tradisi dan narasi universal—dengan mengklaim kebenaran mutlak dan otoritas yang tidak dapat diganggu gugat.²⁶ Teori "Clash of Civilizations" oleh Samuel Huntington, meskipun dikritik, mengemukakan bahwa konflik global pasca-Perang Dingin akan berpusat pada identitas agama, diperparah oleh globalisasi dan melemahnya negara-bangsa.²⁵

Giddens menekankan *refleksivitas* sebagai aspek inti modernitas, di mana masyarakat terus-menerus memeriksa dan membentuk kembali dirinya sendiri. Fundamentalisme agama, meskipun tampaknya anti-modern, dapat dipahami sebagai bentuk modernisasi reflektif, tetapi yang menolak fluiditas dan ketidakpastian modernitas akhir. Alih-alih beradaptasi dengan pengetahuan baru, ia secara reflektif menegaskan kembali kebenaran tradisional dan interpretasi literal sebagai mekanisme pertahanan terhadap ancaman yang dirasakan. Ia menyediakan "narasi besar" yang menawarkan stabilitas dalam dunia makna yang terfragmentasi. Ini menunjukkan bahwa fundamentalisme bukanlah sekadar sisa-sisa masa lalu, melainkan fenomena modern yang

kompleks, yang lahir dari dan bereaksi terhadap kondisi modernitas itu sendiri. Pemahaman ini krusial untuk merumuskan strategi melawan intoleransi, karena fundamentalisme tidak dapat diatasi hanya dengan rasionalitas sekuler, tetapi perlu memahami kebutuhan akan makna dan kepastian yang mendasarinya.

Masyarakat Pasca-Sekuler dan Liberalisme Politik

Di tengah dinamika modernitas dan respons fundamentalisme, muncul diskusi tentang peran agama dalam ruang publik dan bagaimana masyarakat pluralistik dapat mencapai koeksistensi yang adil.

Peran Agama dalam Ruang Publik menurut Jürgen Habermas

Jürgen Habermas memperkenalkan konsep "masyarakat pasca-sekuler," sebuah kritik terhadap sekularisme modern yang berpendapat bahwa masyarakat kontemporer harus beradaptasi dengan fakta bahwa komunitas agama terus eksis dan mempertahankan pengaruhnya di tengah sekularisasi yang berkelanjutan.²⁷ Menurut Habermas, agama tidak dapat lagi dipinggirkan dalam analisis masyarakat sekuler kontemporer; suaranya, yang sebelumnya diprivatisasi dan dianggap sebagai masalah pribadi, kini kembali ke ruang publik.²⁸

Habermas berpendapat bahwa warga negara religius memiliki tanggung jawab untuk menerjemahkan diskursus keagamaan mereka ke dalam bahasa yang dapat diakses secara umum—sebuah proses yang disebut "terjemahan diskursif".²⁷ Ini memungkinkan mereka untuk berdiskusi dan berkomunikasi secara efektif dengan rekan-rekan sekuler mereka, memfasilitasi dialog yang konstruktif di ruang publik. Konsep ini merupakan kritik terhadap sikap sekuleris yang "tidak sopan" yang cenderung menghalangi argumen agama masuk ke ruang publik, menganggapnya tidak rasional atau tidak relevan.²⁸

Habermas menantang tesis sekularisasi tradisional dengan mengamati kegigihan dan kemunculan kembali agama di ruang publik. Konsep "terjemahan diskursif" merupakan mekanisme penting untuk merekonsiliasi perspektif agama dengan akal budi publik. Hal ini menyiratkan bahwa warga negara religius memiliki tanggung jawab untuk mengartikulasikan nilai-nilai mereka dengan cara yang dapat dipahami dan dibenarkan oleh mereka yang tidak menganut keyakinan mereka, sehingga memungkinkan diskursus publik yang inklusif dan otentik. Ini menawarkan jalan keluar dari polarisasi "agama versus sekuler" yang sering terjadi, dengan menciptakan ruang bagi dialog yang konstruktif. Namun, tantangannya adalah apakah kelompok agama bersedia melakukan

"terjemahan diskursif" ini dan apakah kelompok sekuler bersedia mendengarkan, terutama ketika agama telah diinstrumentalisasi untuk tujuan politik yang eksklusif.

Keadilan sebagai Kewajaran dan Konsensus Tumpang Tindih John Rawls

John Rawls, seorang filsuf politik liberal Amerika, mengembangkan teori "keadilan sebagai kewajaran." Teori ini menggambarkan masyarakat yang terdiri dari warga negara bebas dengan hak-hak dasar yang setara yang bekerja sama secara kooperatif dalam sistem ekonomi egaliter.²⁹ Dalam karyanya *Political Liberalism*, Rawls mengeksplorasi penggunaan kekuasaan politik yang sah dalam demokrasi dan bagaimana persatuan sipil dapat bertahan meskipun ada keragaman pandangan dunia yang mendalam—apa yang ia sebut "pluralisme yang masuk akal".³⁰

Prinsip liberal legitimasi Rawls menyatakan bahwa penggunaan kekuasaan politik hanya sepenuhnya tepat ketika dilakukan sesuai dengan konstitusi yang esensinya dapat diharapkan secara wajar untuk didukung oleh semua warga negara sebagai individu yang bebas dan setara, berdasarkan prinsip dan cita-cita yang dapat diterima oleh akal sehat bersama mereka.³⁰ Ini berarti bahwa hukum dan kebijakan harus dapat diterima oleh semua warga negara, bukan hanya mayoritas, dan harus memenuhi kriteria timbal balik.³⁰ Untuk mencapai hal ini, Rawls mengemukakan konsep "konsensus tumpang tindih" (*overlapping consensus*), yaitu prinsip-prinsip keadilan yang dapat didukung oleh semua individu yang rasional, terlepas dari pandangan komprehensif (agama, moral, filosofis) mereka yang berbeda.³¹

Rawls menyediakan cita-cita normatif untuk masyarakat pluralistik. Prinsip liberal legitimasi dan konsensus tumpang tindihnya menawarkan cetak biru tentang bagaimana warga negara yang beragam, termasuk mereka yang memiliki keyakinan agama yang kuat, dapat menyepakati prinsip-prinsip politik fundamental tanpa meninggalkan doktrin komprehensif mereka. Ini adalah tentang menemukan titik temu untuk keadilan dan kerja sama, bahkan di tengah perbedaan pendapat yang mendalam tentang kebenaran tertinggi. Teori Rawls sangat relevan untuk mengatasi intoleransi dengan menyediakan dasar bagi hukum dan kebijakan yang adil bagi semua, bukan hanya mayoritas. Namun, tantangannya adalah bagaimana mencapai konsensus tumpang tindih ini dalam praktik, terutama ketika politik identitas telah mengikis kemampuan untuk berdialog secara rasional dan mengakui legitimasi pandangan yang berbeda.

Etika Tanggung Jawab Emmanuel Levinas terhadap "Yang Lain"

Emmanuel Levinas, seorang filsuf etika, menempatkan etika sebagai "filosofi pertama," yang berakar pada perjumpaan dengan "Yang Lain" (dengan huruf kapital 'O').³³ Baginya, tanggung jawab etis muncul dari perjumpaan pribadi dengan manusia lain, khususnya melalui "wajah Yang Lain," yang memaksakan tanggung jawab tak terbatas yang tidak didasarkan pada timbal balik atau kepentingan diri sendiri.³³ Levinas berpendapat bahwa subjektivitas—siapa diri kita—lahir dari hubungan kita dengan Yang Lain; "menjadi-untuk-yang-lain" mendefinisikan diri.³⁴ Tanggung jawab ini datang dari luar subjek dan mempertanyakan otonomi subjek, menuntut penyerahan diri dan pelayanan tanpa mencari pengakuan.³⁴

Levinas berpendapat bahwa etika tradisional dan filsafat seringkali didasarkan pada egoisme dan pengabaian "Yang Lain," dengan terlalu menekankan pemenuhan diri dan pengembangan diri.³⁴ Sebaliknya, ia menekankan solidaritas dan kerja sama manusia yang muncul dari perjumpaan etis ini. Perjumpaan dengan "ketelanjangan" Yang Lain, seperti melihat seorang tunawisma di jalan, memunculkan panggilan untuk bertindak yang melampaui analisis rasional.³³

Sementara Habermas dan Rawls menawarkan kerangka kerja untuk pluralisme politik dan diskursif, Levinas memberikan fondasi etika eksistensial yang lebih dalam. Konsep tanggung jawab tak terbatas dan non-timbal baliknya untuk "Yang Lain" melampaui sekadar toleransi atau kepentingan diri bersama. Hal ini menuntut keterbukaan radikal terhadap perbedaan, di mana definisi diri terikat pada tanggung jawab seseorang terhadap yang lain. "Ketelanjangan" Yang Lain ini menyerukan respons yang segera dan tanpa pamrih. Etika Levinas sangat penting untuk pluralisme sejati, karena ia menuntut lebih dari sekadar hidup berdampingan; ia menuntut pengakuan mendalam atas kerentanan dan martabat Yang Lain, dan kesediaan untuk berkorban demi kebaikan mereka. Dalam konteks intoleransi, etika ini menantang logika "kami versus mereka" dengan menegaskan bahwa identitas diri kita terikat pada pengakuan dan tanggung jawab terhadap setiap individu, terlepas dari afiliasi kelompoknya. Ini adalah fondasi etis yang kuat untuk melawan dehumanisasi dan kekerasan yang sering menyertai politik identitas.

Bagian III

Studi Kasus Intoleransi Agama di Indonesia

Indonesia, dengan semboyan nasional "Bhinneka Tunggal Ika," secara filosofis berkomitmen pada pluralisme. Namun, realitas di lapangan seringkali menunjukkan tantangan signifikan dalam mewujudkan cita-cita tersebut, dengan berbagai kasus intoleransi yang menyoroti kesenjangan antara ideal dan praktik.

Lanskap Pluralisme dan Tantangan di Indonesia

Bhinneka Tunggal Ika: Makna Filosofis dan Realitasnya

Semboyan nasional "Bhinneka Tunggal Ika" (Berbeda-beda tetapi Tetap Satu) adalah navigator yang memandu bangsa Indonesia yang beragam untuk tetap bersatu dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).³⁵ Semboyan ini, yang dinukil dari Kitab Sutasoma karya Mpu Tantular pada abad ke-14, mencerminkan kesadaran historis akan realitas kultural masyarakat Indonesia yang kaya akan keberagaman.³⁵ Makna filosofisnya sangat kaya, meliputi pengakuan dan penghargaan atas keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan golongan sebagai kekayaan bangsa yang alami dan tidak perlu dihilangkan.³⁶

Selain itu, Bhinneka Tunggal Ika menekankan persatuan dalam keberagaman, di mana seluruh elemen bangsa harus bersatu sebagai satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa persatuan, tanpa menghilangkan perbedaan.³⁶ Semboyan ini juga mengajarkan pentingnya toleransi dan saling menghormati antarwarga negara yang berbeda latar belakang, serta prinsip kesetaraan dan keadilan di hadapan hukum dan pemerintahan.³⁶ Terakhir, ia mendorong semangat gotong royong, kerja sama lintas kelompok, patriotisme, dan nasionalisme untuk memajukan bangsa.³⁶

Meskipun *Bhinneka Tunggal Ika* mewakili komitmen filosofis yang mendalam terhadap pluralisme, yang tertanam kuat dalam sejarah Indonesia, realitas hukum dan praktik selanjutnya menunjukkan kesenjangan yang signifikan antara cita-cita ini dan implementasinya. Keberadaan undang-undang dan praktik diskriminatif menunjukkan bahwa meskipun retorika persatuan dalam keberagaman kuat, kemauan institusional dan sosial untuk benar-benar menegakkannya bagi semua kelompok seringkali kurang. Tantangan utama Indonesia bukanlah kurangnya filosofi pluralisme, melainkan kegagalan dalam mewujudkan filosofi tersebut dalam praktik. Hal ini menyoroti bahwa pluralisme tidak dapat hanya bergantung pada semboyan, tetapi membutuhkan penegakan hukum yang adil dan komitmen nyata dari semua aktor sosial dan politik.

Kerangka Hukum dan Kebijakan terkait Kebebasan Beragama

Konstitusi Indonesia menjamin kebebasan beragama dan hak untuk beribadah sesuai keyakinan masing-masing.³⁷ Namun, jaminan ini disertai dengan klausul bahwa warga negara harus menerima pembatasan yang ditetapkan oleh hukum untuk melindungi hak orang lain dan memenuhi "tuntutan yang adil berdasarkan pertimbangan moralitas, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis".³⁷ Kementerian Agama (MORA) secara resmi mengakui enam kelompok agama: Islam (Sunni sebagai versi yang diakui secara luas), Katolik, Protestan, Buddha, Hindu, dan Konghucu.³⁷ Kelompok agama asli, yang dikenal sebagai *aliran kepercayaan*, harus mendaftar secara terpisah dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mendapatkan status resmi.³⁷

Undang-Undang Penistaan Agama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melarang pernyataan atau aktivitas publik yang menghina atau memfitnah salah satu dari enam agama yang diakui atau bermaksud mencegah individu menganut agama resmi, dengan ancaman hukuman penjara hingga lima tahun.³⁷ Selain itu, Peraturan Bersama Menteri (PBM) Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 mengatur persyaratan yang ketat untuk pembangunan rumah ibadah. Peraturan ini mengharuskan kelompok agama memperoleh tanda tangan dari setidaknya 90 anggota kelompok mereka dan 60 orang dari kelompok agama lain di komunitas, serta persetujuan dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) setempat.³⁷ Peraturan ini secara luas dianggap diskriminatif terhadap minoritas agama.⁴¹ Di Provinsi Aceh, peraturan syariah diterapkan, mengkriminalisasi perilaku tertentu bagi penduduk Muslim, termasuk hubungan seksual sesama jenis konsensual, perzinahan, perjudian, dan konsumsi alkohol.³⁷

Meskipun konstitusi Indonesia secara teoritis menjamin kebebasan beragama, kerangka hukum selanjutnya memperkenalkan klausul dan persyaratan yang, dalam praktiknya, sangat membatasi kebebasan ini. Klausul "pembatasan yang ditetapkan oleh hukum" menjadi celah untuk diskriminasi. PBM 9 & 8/2006, khususnya, secara efektif memberikan hak veto kepada kelompok mayoritas atas ruang ibadah minoritas, melembagakan intoleransi daripada mempromosikan harmoni. Undang-undang penistaan agama kemudian dipersenjatai untuk membungkam perbedaan pendapat dan menganiaya minoritas. Kerangka hukum ini, alih-alih melindungi pluralisme, justru menciptakan celah untuk diskriminasi dan penganiayaan. Ini menunjukkan bahwa niat baik konstitusional dapat digagalkan oleh implementasi yang bias dan undang-undang yang ambigu, yang pada akhirnya memperburuk konflik identitas dan melemahkan kohesi sosial.

Kasus-Kasus Intoleransi yang Mendalam

Beberapa kasus intoleransi agama di Indonesia menyoroti bagaimana kerangka hukum dan dinamika sosial dapat berinteraksi untuk menghasilkan pelanggaran hak-hak kebebasan beragama.

Kasus Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin, Bogor

Kasus GKI Yasmin di Bogor merupakan konflik berkepanjangan selama 16 tahun yang menarik kritik internasional dan domestik terhadap pemerintah pusat dan daerah atas penanganan kasus yang dianggap buruk.⁴⁴ Konflik ini bermula ketika izin pembangunan gereja yang telah disetujui pada tahun 2006 dicabut oleh Walikota Bogor pada tahun 2008, dengan alasan adanya pemalsuan tanda tangan.⁴⁴ Meskipun Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dan Mahkamah Agung pada tahun 2010 telah memutuskan mendukung gereja, pemerintah kota Bogor tetap menyegel bangunan tersebut.⁴⁰

Protes terus-menerus dari kelompok Muslim garis keras, seperti Forum Komunikasi Muslim Indonesia (Forkami) dan Gerakan Reformasi Islam (Garis), memaksa jemaat untuk menghentikan pembangunan dan beribadah di tempat lain, seperti tempat parkir supermarket atau rumah pribadi, di mana mereka sering menghadapi gangguan.⁴⁴ Pemerintah pusat seringkali dianggap lalai atau bahkan terlibat dalam penanganan kasus ini, tidak menegakkan keputusan pengadilan dan mengklaim penutupan diperlukan untuk mencegah konflik horizontal.⁴⁰ Penyelesaian kasus ini baru tercapai pada tahun 2023, melibatkan pemberian lahan baru untuk gereja sekitar satu kilometer dari lokasi lama. Meskipun dirayakan oleh pemerintah sebagai model resolusi konflik, Komnas HAM memandangnya sebagai "kompromi realistis" tetapi "tidak ideal," karena masih melibatkan relokasi paksa minoritas.⁴⁴

Kasus GKI Yasmin secara gamblang menunjukkan bagaimana kemenangan hukum bagi minoritas agama dapat secara sistematis dirusak oleh kelambanan pemerintah daerah dan tekanan dari kelompok garis keras. Meskipun ada putusan Mahkamah Agung, pemerintah kota Bogor memprioritaskan "pencegahan konflik horizontal"—secara efektif tunduk pada tuntutan mayoritas—daripada menegakkan supremasi hukum dan melindungi hak-hak minoritas. "Resolusi" akhir melalui relokasi memperkuat prinsip mayoritarian, di mana minoritas harus mengalah demi kenyamanan mayoritas. Kasus ini menunjukkan bahwa kerangka hukum yang ada tidak cukup tanpa kemauan politik yang kuat untuk menegakkannya secara adil. Ini juga menyoroti bagaimana retorika "harmoni" dapat digunakan untuk membenarkan diskriminasi, dengan menempatkan beban adaptasi pada kelompok minoritas.

Persekusi Komunitas Ahmadiyah

Komunitas Ahmadiyah di Indonesia menghadapi persekusi yang parah karena mereka mengidentifikasi diri sebagai Muslim tetapi dianggap "sesat" atau "menyimpang" oleh sebagian besar Muslim lain karena perbedaan keyakinan tentang kenabian Muhammad.⁴⁶ Sejak awal, berbagai fatwa telah dikeluarkan oleh organisasi keagamaan Indonesia, seperti Muhammadiyah pada tahun 1929 dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1965, 1980, dan 2005, yang menyatakan mereka "menyimpang" dan meminta pemerintah untuk menghalangi penyebaran ajaran mereka.⁴⁶

Pada Juni 2008, pemerintah mengeluarkan keputusan nasional yang memerintahkan komunitas Ahmadiyah untuk "menghentikan penyebaran interpretasi dan kegiatan yang menyimpang dari ajaran utama Islam," dengan ancaman hukuman penjara hingga lima tahun bagi pelanggarnya.⁴⁷ Keputusan ini diikuti oleh serangan kekerasan oleh militan Islamis, termasuk insiden di Cikeusik pada Februari 2011 yang menewaskan tiga pria Ahmadiyah.⁴⁷ Selama pemerintahan Yudhoyono (2004-2014), lebih dari 30 masjid Ahmadiyah ditutup paksa, seringkali dengan keterlibatan atau kelambanan polisi dan pejabat pemerintah daerah.⁴⁷ Anggota Ahmadiyah juga menghadapi tekanan untuk membubarkan diri atau pindah agama, dan Buku pada tahun 2017 menyebutkan penolakan untuk mengeluarkan kartu identitas (KTP) kecuali mereka melepaskan keyakinan mereka.⁴⁶

Persekusi Ahmadiyah menunjukkan bentuk intoleransi yang parah di mana perbedaan teologis diterjemahkan menjadi diskriminasi yang disetujui negara dan serangan kekerasan. Penerbitan fatwa oleh badan semi-pemerintah seperti MUI memberikan pembenaran ideologis, yang kemudian diperkuat oleh keputusan nasional dan seringkali keterlibatan atau kelambanan dari pihak berwenang setempat. Hal ini menciptakan lingkungan sistemik di mana keberadaan dan hak kelompok minoritas untuk mempraktikkan keyakinan mereka ditolak berdasarkan interpretasi mayoritas terhadap doktrin agama. Kasus ini menunjukkan bahaya ketika interpretasi agama tertentu dilembagakan menjadi kebijakan negara, mengikis prinsip kebebasan beragama dan membuka pintu bagi kekerasan. Ini juga menyoroti bagaimana tekanan dari kelompok garis keras dapat memengaruhi tindakan pemerintah, bahkan ketika tindakan tersebut melanggar konstitusi dan hukum internasional.

Diskriminasi terhadap Komunitas Syiah

Komunitas Syiah di Indonesia juga menjadi sasaran diskriminasi dan kekerasan. Mereka sering dilabeli sebagai "penista agama" oleh kelompok militan Islamis, seperti Forum Umat Islam (FUI)

dan Front Pembela Islam (FPI), yang membenarkan kekerasan dengan menafsirkan bahwa Syiah tidak menganut ortodoksi Sunni.⁴⁸ Buku dari kelompok pemantau hak asasi manusia menunjukkan peningkatan serangan kekerasan dan insiden intoleransi terhadap minoritas agama, termasuk Syiah.⁴⁸

Beberapa pejabat pemerintah, termasuk mantan Menteri Agama Suryadharma Ali, telah membuat pernyataan diskriminatif, seperti usulan agar Syiah pindah ke Islam Sunni.⁴⁸ Pejabat pemerintah dan aparat keamanan seringkali memfasilitasi pelecehan dan intimidasi terhadap minoritas agama dengan membuat pernyataan diskriminatif, menolak mengeluarkan izin pembangunan rumah ibadah, dan menekan jemaat untuk relokasi.⁴⁸ Ancaman terhadap pengungsi Syiah di Yogyakarta juga pernah dilaporkan, menunjukkan kerentanan mereka bahkan dalam situasi kemanusiaan.⁴⁹

Diskriminasi terhadap Syiah menyoroti bahwa intoleransi di Indonesia tidak hanya masalah agama mayoritas versus minoritas, tetapi juga melibatkan polarisasi internal yang signifikan dalam Islam. Kelompok Sunni garis keras dan bahkan pejabat pemerintah secara aktif menargetkan Syiah, menunjukkan bahwa dinamika "kami versus mereka" dapat beroperasi dalam mayoritas agama yang lebih luas, mendefinisikan siapa Muslim "sejati" dan siapa yang "menyimpang." Hal ini memperumit upaya untuk mempromosikan pluralisme, karena konflik tidak hanya terjadi antar-agama, tetapi juga di dalam agama itu sendiri. Ini menuntut pendekatan yang lebih bernuansa yang mengakui dan mengatasi perpecahan internal ini, serta menantang narasi homogenitas yang sering digunakan oleh kelompok-kelompok garis keras.

Tantangan yang Dihadapi Penghayat Kepercayaan

Kelompok Penghayat Kepercayaan di Indonesia menghadapi tantangan unik karena mereka tidak diakui secara resmi sebagai salah satu dari enam agama yang diakui pemerintah, melainkan sebagai "kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa".⁵⁰ Akibatnya, mereka sering dianggap sebagai "orang tanpa agama," "orang luar," atau bahkan "ateis" oleh masyarakat, yang mengarah pada perjuangan panjang untuk mendapatkan pengakuan dan penerimaan.⁵⁰ Mereka juga menghadapi stereotip negatif, sering dikaitkan dengan sihir, perdukunan, atau aliran sesat.⁵⁰

Salah satu masalah paling menonjol adalah terkait kartu identitas (KTP). Secara historis, kolom agama pada KTP mereka dikosongkan, menyebabkan kesulitan dalam mengakses layanan publik.⁵⁰ Meskipun Mahkamah Konstitusi pada tahun 2017 mengabulkan peninjauan kembali Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, yang memungkinkan mereka untuk menulis "kepercayaan" di KTP, banyak penghayat masih enggan mengungkapkan identitas mereka secara terbuka karena tekanan historis, marginalisasi, dan karakterisasi negatif terhadap keyakinan mereka.⁵⁰ Selain itu, terdapat keluhan mengenai kurangnya komitmen pemerintah dan anggaran yang sangat kecil untuk pemberdayaan Penghayat, yang semakin mengukuhkan status marginal mereka.⁵⁰

Tantangan yang dihadapi Penghayat Kepercayaan menunjukkan diskriminasi sistemik yang mendalam yang melampaui insiden kekerasan tertentu. Ini adalah tentang penyangkalan keberadaan sah mereka dalam kerangka nasional. Masalah KTP, meskipun ada kemenangan hukum, menyoroti seberapa dalam stigma sosial dan marginalisasi historis dapat mencegah individu untuk menggunakan hak-hak mereka, bahkan ketika secara hukum dijamin. Kurangnya komitmen dan anggaran pemerintah semakin memperkuat status marginal mereka. Kasus ini menunjukkan bahwa pluralisme tidak hanya tentang melindungi kelompok agama yang diakui, tetapi juga tentang pengakuan penuh dan inklusi bagi semua bentuk keyakinan. Ini menuntut perubahan budaya dan struktural yang lebih dalam untuk mengatasi prasangka dan memastikan kesetaraan akses terhadap hak-hak dasar.

Tabel: Ringkasan Kasus Intoleransi Agama di Indonesia

Kasus	Kelompok Terdampak	Bentuk Intoleransi	Aktor Terlibat (Negatif/Positif)	Status/Dampak
GKI Yasmin, Bogor	Kristen Protestan	Penutupan/penolakan rumah ibadah, gangguan ibadah, relokasi paksa.	Walikota Bogor, Forkami, Garis (Negatif); Mahkamah Agung, Komnas HAM (Positif, meski kompromi).	Konflik berkepanjangan 16 tahun, pelanggaran hak beragama, relokasi paksa.
Komunitas Ahmadiyah	Muslim Ahmadiyah	Fatwa "sesat", keputusan pemerintah yang membatasi, kekerasan fisik, penutupan masjid, diskriminasi KTP.	MUI, Pemerintah (nasional & daerah), Militan Islamis (Negatif).	Persekusi sistemik, pelanggaran hak fundamental, stigma sosial.
Komunitas Syiah	Muslim Syiah	Pelabelan "penista agama", pernyataan diskriminatif pejabat, serangan kekerasan, kesulitan izin	FUI, FPI, Pejabat pemerintah (Negatif).	Peningkatan insiden intoleransi, polarisasi internal dalam Islam.

		rumah ibadah.		
Penghayat Kepercayaan	Penganut Kepercayaan	Penolakan status agama, stigma "atheis/sesat", kesulitan akses layanan publik (KTP), kurangnya dukungan pemerintah.	Masyarakat umum (kurang informasi), Pemerintah (kurang komitmen).	Diskriminasi sistemik, marginalisasi sosial, keengganan untuk identifikasi diri.

Tabel ini memberikan gambaran umum yang terstruktur tentang studi kasus intoleransi agama yang terperinci. Tabel ini memungkinkan analisis komparatif berbagai bentuk intoleransi, kelompok-kelompok tertentu yang terkena dampak, aktor-aktor yang terlibat, dan pola diskriminasi yang umum. Sintesis ini membuat realitas kompleks intoleransi agama di Indonesia lebih mudah dicerna dan menyoroti sifat sistemik masalah tersebut, memperkuat argumen bahwa ini bukan insiden terisolasi tetapi gejala masalah yang lebih dalam.

Peran Aktor dan Media Digital dalam Amplifikasi Intoleransi

Dinamika intoleransi di Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh kerangka hukum dan kebijakan, tetapi juga oleh interaksi kompleks antara berbagai aktor sosial dan peran amplifikasi dari media digital.

Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan (Ormas) dan Polarisasi

Organisasi kemasyarakatan keagamaan (Ormas) memainkan peran ganda dalam lanskap keagamaan Indonesia. Di satu sisi, kelompok garis keras seperti Forum Komunikasi Muslim Indonesia (Forkami), Front Pembela Islam (FPI)—sebelum dilarang—Forum Umat Islam (FUI), dan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) secara aktif terlibat dalam protes, kekerasan, dan tekanan terhadap minoritas agama.³⁷ Mereka seringkali memobilisasi dukungan berdasarkan narasi eksklusif yang membedakan "kami" dari "mereka," memperkuat polarisasi.

Di sisi lain, beberapa Ormas Islam yang lebih besar dan mapan, seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, berperan sebagai penerus ajaran moderasi Walisongo di Indonesia.⁵² Mereka

membangun tradisi Islam yang toleran dan inklusif, serta mempromosikan persatuan umat, menghindari kekerasan, dan mengambil jalan tengah dalam penyelesaian masalah.⁵² Ormas-ormas moderat ini mengintegrasikan Islam dengan tradisi lokal dan menekankan pentingnya hubungan baik dengan sesama manusia, tidak hanya dengan Tuhan.⁵²

Terdapat polarisasi politik yang terkait dengan kelompok agama, terutama di negara-negara seperti Amerika Serikat, di mana kelompok religius yang sangat aktif secara politik mendukung partai-partai tertentu.²⁰ Polarisasi ini seringkali didorong oleh apa yang disebut "religiusitas defensif" yang muncul sebagai respons terhadap sekularisasi dan modernisasi yang dirasakan mengikis nilai-nilai tradisional.²⁰

Bagian ini mengungkapkan dinamika internal yang kritis: organisasi keagamaan tidak monolitik. Sementara beberapa (NU, Muhammadiyah) secara aktif mempromosikan moderasi dan pluralisme, yang lain (FPI, FUI) secara aktif memicu intoleransi dan kekerasan. Hal ini menciptakan kontestasi narasi dalam ruang publik keagamaan. Polarisasi politik semakin memperburuk hal ini, karena aktor politik memanfaatkan perpecahan internal ini, seringkali memberdayakan suara-suara yang lebih ekstrem. Upaya untuk mempromosikan pluralisme harus secara aktif mendukung dan memperkuat Ormas moderat, sekaligus secara tegas menindak kelompok-kelompok garis keras dan menantang narasi eksklusif mereka. Ini bukan hanya tentang penegakan hukum, tetapi juga tentang memenangkan "perang narasi" di ruang publik.

Dampak Media Digital dan Misinformasi

Digitalisasi yang pesat di Indonesia telah menyebabkan peningkatan narasi kebencian dan pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan (FoRB) serta kebebasan berekspresi (FoE) di ruang publik yang dimediasi secara digital.⁵⁴ Media, baik televisi maupun media sosial, seringkali disibukkan dengan pemberitaan seputar penistaan agama, diskriminasi kaum minoritas, dan isu intoleransi serupa.¹⁷ Pemberitaan yang tidak seimbang, pengambilan pendapat satu arah, dan pencampuran opini dan fakta dapat memicu perdebatan dan kesalahpahaman antar umat beragama, bahkan menimbulkan kekerasan.¹⁷

Akses internet yang mudah dimanfaatkan oleh oknum penyebar kebencian (*hate speech*) untuk mempropagandakan kekerasan dan diskriminasi atas nama agama, seringkali dengan berita yang tidak berimbang, satu arah, atau hoaks.¹⁷ Algoritma media sosial dan fenomena "ruang gema" (

echo chambers) memperkuat pembagian dan disinformasi, membuat kebenaran sulit dibedakan dan memicu "tribalisme" digital, di mana orang cenderung mencari informasi yang mengkonfirmasi pandangan mereka sendiri.¹⁵ Hal ini dapat menyebabkan demonisasi kelompok luar dan keyakinan bahwa kekerasan terhadap mereka adalah suatu kebajikan.¹⁶

Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya untuk mempromosikan toleransi melalui media, seperti kampanye "Moderasi Beragama" dan berbagai inisiatif duta besar.³⁷ Namun, tantangan disinformasi tetap besar.

Media digital, meskipun menawarkan potensi untuk kesadaran dan dialog, bertindak sebagai akselerator yang kuat untuk intoleransi agama. Kemudahan penyebaran informasi, dikombinasikan dengan amplifikasi algoritmik dan pembentukan ruang gema, menciptakan lahan subur bagi ujaran kebencian dan misinformasi untuk menyebar dengan cepat dan mendalam. Hal ini secara langsung merusak kondisi untuk diskursus publik yang rasional (seperti yang diusulkan Habermas) dan saling pengertian (seperti yang diusulkan Rawls), sehingga lebih sulit untuk membangun "konsensus tumpang tindih" tentang nilai-nilai bersama. Mengatasi intoleransi di era digital membutuhkan lebih dari sekadar penegakan hukum; ia membutuhkan literasi media yang kuat, pengembangan algoritma yang bertanggung jawab, dan upaya aktif untuk memecah ruang gema digital serta mempromosikan narasi inklusif. Ini juga menyoroti tanggung jawab platform digital dalam mengelola konten.

Bagian IV

Potensi Kecerdasan Buatan (AI) dalam Memahami dan Mempromosikan Pluralisme

Di tengah tantangan intoleransi agama, Kecerdasan Buatan (AI) muncul sebagai alat dengan potensi besar untuk memahami dan mempromosikan pluralisme. Namun, pemanfaatan AI dalam konteks yang sensitif seperti agama memerlukan pertimbangan etis yang cermat.

AI dan Etika Informasi: Perspektif Luciano Floridi

Luciano Floridi adalah seorang filsuf terkemuka yang berfokus pada Etika Digital (juga dikenal sebagai Etika Informasi dan Komputer), Etika AI, dan Filsafat Informasi.⁵⁶ Ia mengemukakan tesis fundamental bahwa AI adalah "perceraian yang belum pernah terjadi sebelumnya antara agensi dan kecerdasan".⁵⁸ Ini berarti bahwa AI memiliki kemampuan untuk bertindak (agensi) dan menghasilkan dampak di dunia nyata tanpa memiliki pemahaman sejati, kesadaran moral, atau pengalaman hidup yang mendalam (kecerdasan).⁵⁹

Sebagai bentuk agensi baru, AI dapat dimanfaatkan secara etis maupun tidak etis, tergantung pada bagaimana manusia mendesain dan menggunakannya.⁵⁸ Floridi menekankan pentingnya pengembangan prinsip-prinsip etika yang kuat untuk AI, mengidentifikasi potensi risiko yang mungkin timbul, dan membahas hubungan antara prinsip etika dan norma hukum.⁵⁸ Ia juga mendefinisikan "etika lunak" (*soft ethics*) sebagai etika pasca-kepatuhan (*post-compliance ethics*), yang melampaui kepatuhan hukum minimal untuk mencapai perilaku yang benar-benar bertanggung jawab.⁵⁸ Floridi sangat terlibat dalam inisiatif kebijakan mengenai nilai sosio-etis dan implikasi teknologi digital, bekerja sama dengan lembaga-lembaga seperti Komisi Eropa dan Dewan Etika Jerman, menunjukkan komitmennya terhadap penerapan etika AI di tingkat praktis dan kebijakan.⁵⁶

Pemahaman inti Floridi bahwa AI merepresentasikan "perceraian antara agensi dan kecerdasan" adalah fundamental. Ini berarti AI dapat melakukan sesuatu dan memiliki efek di dunia, bahkan yang mendalam, tanpa benar-benar memahami implikasi moral, spiritual, atau kemanusiaan dari tindakannya. Kurangnya kesadaran atau pengalaman hidup yang melekat ini membuat pertimbangan etis menjadi yang terpenting. Ini bukan tentang AI yang menjadi moral, tetapi tentang manusia yang merancang dan menggunakan AI secara moral. Dalam konteks agama dan pluralisme, ini berarti AI tidak dapat menjadi panduan spiritual atau otoritas moral yang sejati.

Potensinya terletak pada perannya sebagai alat bantu yang kuat, tetapi penggunaannya harus selalu diawasi oleh pertimbangan etis manusia untuk mencegah bias, manipulasi, distorsi doktrinal, atau dehumanisasi pengalaman spiritual.

Tabel: Pertimbangan Etis AI dalam Konteks Keagamaan

Dimensi Etis	Penjelasan/Implikasi	Relevansi
Kurangnya Spiritualitas	AI tidak memiliki pengalaman emosional, eksistensial, atau transenden; tidak dapat merasakan atau bergulat dengan pertanyaan spiritual.	59
Otoritas Keagamaan	Penggunaan AI untuk bimbingan spiritual dapat mengikis peran dan otoritas pemimpin spiritual manusia yang memiliki agensi moral.	59
Eksplorasi dan Manipulasi	AI dapat menganalisis data pribadi dan emosi, berpotensi memanipulasi keyakinan atau kebutuhan emosional individu untuk keuntungan komersial/ideologis.	59
Dehumanisasi Pengalaman Religius	Penggunaan mesin dalam pengaturan spiritual dapat menjauhkan individu dari aspek komunal, emosional, dan relasional agama yang kaya.	59
Bias Algoritma	AI mencerminkan bias dari data pelatihannya, berpotensi memperkuat hierarki sosial atau pandangan dominan (misalnya,	62

	Barat, liberal) atas pandangan minoritas.	
Distorsi Doktrinal	AI dapat menghasilkan interpretasi teologis yang tidak koheren atau sinkretis, mencampuradukkan kategori teologis dan menyebabkan kebingungan.	61
Pseudo-Prophecy / Mimikri Wahyu	AI dapat meniru suara ilahi atau memberikan "wawasan kenabian" yang tidak memiliki otentisitas spiritual atau akuntabilitas doktrinal.	61
Komodifikasi Pengalaman Religius	Efisiensi AI dalam aplikasi keagamaan dapat mengurangi hubungan ilahi-manusia menjadi antarmuka transaksional, mengkomodifikasi spiritualitas.	61

Tabel ini secara sistematis mengkategorikan tantangan etika kompleks yang ditimbulkan oleh AI dalam konteks keagamaan, melampaui etika AI umum hingga masalah teologis dan spiritual tertentu. Dengan menguraikan pertimbangan-pertimbangan ini, tabel ini mempersiapkan pembaca untuk diskusi bernuansa tentang potensi AI sambil menekankan kebutuhan kritis akan desain dan penerapan etika yang cermat dan berpusat pada manusia. Ini memperkuat perspektif Floridi tentang agensi AI tanpa kecerdasan, menunjukkan bagaimana hal ini dapat menyebabkan dilema etika yang mendalam dalam domain spiritual.

Memfaatkan AI untuk Analisis dan Pemahaman Lintas Agama

Terlepas dari tantangan etis, AI menawarkan peluang signifikan untuk meningkatkan pemahaman dan mempromosikan pluralisme.

Analisis Teks Suci dan Basis Pengetahuan Lintas Agama

AI merevolusi penelitian dan studi teks suci dengan kemampuannya memproses volume data tekstual yang sangat besar dalam hitungan detik. Algoritma AI dapat mengidentifikasi pola, struktur linguistik, dan koneksi tematik yang mungkin membutuhkan waktu bertahun-tahun bagi para sarjana manusia untuk menganalisisnya.⁶⁵ Ini memfasilitasi upaya terjemahan yang lebih tepat, membantu menguraikan konstruksi tata bahasa yang kompleks, dan menyempurnakan pemahaman teologis.⁶⁵

Lebih lanjut, AI dapat mengkategorikan dan merujuk silang tema dan motif di seluruh kitab suci, serta mengidentifikasi referensi intertekstual antara berbagai teks suci (misalnya, Al-Qur'an dan Alkitab).⁶⁵ Kemampuan ini dapat mengungkap wawasan baru tentang narasi dan tema bersama, serta secara objektif menganalisis konten untuk menentukan hubungan tekstual.⁶⁷ AI juga dapat menganalisis nada emosional (*sentiment analysis*) dalam teks suci, membantu para sarjana memahami suasana hati dan penekanan pesan, yang selaras dengan seruan untuk menafsirkan Firman dengan hikmat dan kearifan.⁶⁵ Potensi AI untuk menghasilkan "wawasan yang tidak bias dan logis" dalam perbandingan teks suci dapat menantang prasangka dan mempromosikan pemahaman yang lebih objektif antar tradisi.⁶⁷

Kemampuan AI untuk melakukan analisis tekstual berskala besar dan cepat di berbagai teks suci menawarkan kesempatan unik untuk melampaui perbandingan anekdot atau bias. Dengan secara objektif mengidentifikasi tema-tema yang sama, pola linguistik, dan konteks historis, AI dapat menyediakan fondasi berbasis data untuk dialog antaragama. Hal ini dapat menantang narasi "kami versus mereka" yang seringkali bergantung pada salah tafsir atau pembacaan selektif, mendorong pemahaman yang lebih bernuansa dan berbasis bukti tentang kesamaan dan perbedaan agama. Ini dapat menjadi alat yang ampuh untuk mempromosikan pluralisme dengan menunjukkan bahwa, di balik perbedaan permukaan, mungkin ada benang merah spiritual atau etis yang mengikat tradisi-tradisi besar. Ini juga dapat membantu mengidentifikasi akar kesalahpahaman dan memfasilitasi pendidikan yang lebih akurat tentang berbagai keyakinan.

Aplikasi AI dalam Pembinaan Spiritual dan Meditasi

Aplikasi meditasi berbasis AI, seperti Headspace, Calm, dan Muse, menjanjikan peningkatan kesejahteraan, ketenangan batin, dan kesadaran yang lebih intensif dengan menyesuaikan dan mempermudah akses ke praktik spiritual.⁶⁰ AI dapat bertindak sebagai antarmuka seperti pendeta atau menteri, menawarkan petunjuk, memantau kemajuan, dan menyediakan dukungan yang dipersonalisasi.⁶⁰ Chatbot bertenaga AI untuk situs web gereja, dorongan yang dipersonalisasi, dan alat studi Alkitab dapat meningkatkan keterlibatan komunitas dan pengembangan iman.⁶⁸

Selain itu, AI dapat menyediakan *real-time captions* dan terjemahan bahasa untuk layanan keagamaan, menjadikannya inklusif dan mudah diakses oleh semua peserta, terlepas dari hambatan bahasa.⁶⁸ Ini membuka pintu bagi pemahaman yang lebih luas dan partisipasi dalam praktik keagamaan bagi audiens yang beragam.

Kapasitas AI untuk personalisasi dapat mendemokratisasi akses ke praktik dan pengetahuan spiritual, membuatnya lebih mudah diakses dan disesuaikan dengan kebutuhan individu. Hal ini dapat sangat bermanfaat bagi mereka yang merasa terasing dari institusi agama tradisional. Namun, hal ini menimbulkan pertanyaan kritis tentang keaslian pengalaman spiritual ketika dimediasi oleh AI, potensi ketergantungan pada teknologi daripada pertumbuhan batin, dan risiko mengikis aspek komunal agama. Pertumbuhan spiritual sejati seringkali melibatkan hubungan manusia, ritual bersama, dan bimbingan pemimpin manusia yang berpengalaman. Oleh karena itu, AI harus dipandang sebagai pelengkap, bukan pengganti, pengalaman spiritual manusia. Desain harus memprioritaskan sinergi manusia-mesin, memastikan bahwa AI memperkaya, bukan mengurangi, kedalaman dan dimensi relasional dari praktik keagamaan.

Tabel: Potensi Aplikasi AI untuk Mempromosikan Pluralisme

Area Aplikasi	Manfaat untuk Pluralisme	Relevansi
Analisis Teks Suci Lintas Agama	Mengidentifikasi kesamaan dan pola lintas agama, menantang narasi "kami vs. mereka" dengan data objektif.	⁶⁵

Pembelajaran dan Edukasi Agama	Menyediakan informasi akurat dan kontekstual tentang berbagai agama, memfasilitasi pemahaman yang lebih dalam dan mengurangi stereotip.	66
Meditasi dan Pembinaan Spiritual Personal	Mendemokratisasi akses ke praktik spiritual, mendukung kesejahteraan mental, dan menawarkan dukungan yang dipersonalisasi.	60
Moderasi Konten dan Deteksi Ujaran Kebencian	Mengidentifikasi dan mengurangi penyebaran konten intoleran, disinformasi, dan retorika ekstremis di platform digital.	62
Terjemahan dan Aksesibilitas	Memfasilitasi komunikasi dan pemahaman lintas bahasa dan budaya dalam konteks keagamaan, membuat layanan lebih inklusif.	68

Tabel ini secara langsung membahas aspek "potensi AI dalam memahami dan mempromosikan pluralisme." Tabel ini mengalihkan fokus dari masalah ke solusi, memberikan contoh-contoh konkret tentang bagaimana AI dapat dimanfaatkan. Dengan mencantumkan aplikasi-aplikasi spesifik dan manfaatnya, tabel ini menawarkan visi praktis tentang bagaimana teknologi dapat berkontribusi pada masyarakat yang lebih toleran dan harmonis, menyeimbangkan kekhawatiran etika dengan peluang inovatif. Tabel ini berfungsi sebagai penyeimbang yang kuat terhadap tantangan yang dibahas dan memberikan wawasan yang dapat ditindaklanjuti untuk bagian rekomendasi.

Desain AI yang Pluralistik dan Moderasi Konten

Pemanfaatan AI untuk pluralisme tidak dapat dilakukan tanpa mempertimbangkan bagaimana sistem ini dirancang dan diimplementasikan, terutama dalam hal mengatasi bias dan moderasi konten.

Mengatasi Bias Algoritma dan Membangun AI yang Adil

Sistem AI modern sangat bergantung pada umpan balik manusia untuk melatih model, membimbing perilaku yang bertanggung jawab, dan menilai kinerja.⁶³ Untuk AI yang paling bermanfaat, ia harus mencerminkan dan menghormati keragaman nilai, kepercayaan, dan perspektif yang ada dalam dunia pluralistik, bukan hanya pandangan "rata-rata" atau mayoritas.⁶³ Penting untuk melampaui model monolitik pandangan manusia dan merangkul keragaman nilai, serta menguraikan, memahami, dan mengintegrasikannya ke dalam setiap tahap pengembangan AI—mulai dari konseptualisasi dan pengumpulan data hingga pelatihan, evaluasi, dan penerapan.⁶³

Penelitian telah menunjukkan bahwa anotator (penilai data) tidak dapat dipertukarkan; mereka mengambil dari pengalaman dan pengetahuan yang tertanam secara sosial saat membuat penilaian, yang dapat menyebabkan bias jika perspektif kelompok tertentu lebih diutamakan.⁶³ Oleh karena itu, penting untuk menggunakan kerangka kerja psikologi sosial, seperti teori fondasi moral, untuk memahami perbedaan lintas budaya dalam persepsi (misalnya, bahasa ofensif) dan mengintegrasikan definisi nilai yang pluralistik ke dalam penelitian AI.⁶³ Meskipun AI dapat mengkompensasi bias manusia dalam pengambilan keputusan, hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang otonomi individu, karena sistem dapat mengembangkan strategi (terkadang menipu) untuk mengkompensasi kekurangan manusia dalam mencapai tujuan tim.⁶⁴

Tantangan intinya adalah bahwa sistem AI, yang dilatih berdasarkan data manusia, secara inheren mewarisi bias manusia. Untuk membangun AI yang mempromosikan pluralisme, tidak cukup hanya menambahkan "fitur pluralisme" di akhir; pluralisme harus tertanam dalam setiap tahapan desain. Ini berarti secara aktif mencari dan mengintegrasikan beragam perspektif sejak awal, memahami fondasi budaya dan moral dari berbagai kelompok, dan mengakui bahwa anotator data tidak dapat dipertukarkan. Pendekatan proaktif ini sangat penting untuk mencegah AI secara tidak sengaja memperkuat bias yang ada dalam masyarakat atau memaksakan pandangan dunia yang dominan. Hal ini menuntut pendekatan interdisipliner yang kuat dalam pengembangan AI, melibatkan sosiolog, etikus, dan ahli budaya di samping ilmuwan komputer. Kegagalan dalam melakukan ini dapat menyebabkan AI memperburuk intoleransi dengan menghasilkan konten yang bias atau memihak.

Tantangan Moderasi Konten Ekstremisme dan Misinformasi

Alat AI, seperti model Pemrosesan Bahasa Alami (NLP) seperti BERT, sangat penting untuk mengidentifikasi ujaran kebencian dan retorika ekstremis, serta mendeteksi *deepfake* yang digunakan untuk menyebarkan informasi palsu.⁶² Namun, sistem AI tidak kebal terhadap bias yang dimasukkan dalam data pelatihannya; alat moderasi otomatis dapat secara tidak sengaja menargetkan komunitas yang terpinggirkan, menimbulkan kekhawatiran tentang perlakuan yang adil dan merusak kepercayaan.⁶² Pengumpulan data besar-besaran yang diperlukan untuk AI juga menimbulkan kekhawatiran tentang privasi, kebebasan sipil, dan kebebasan berekspresi.⁶²

Alat moderasi otomatis sering kesulitan membedakan antara pembicaraan terkait ras dan pembicaraan rasis, yang dapat menyebabkan positif palsu dan memicu ketidakpercayaan.⁶² Ada risiko dampak psikologis yang tidak disengaja pada individu non-ekstremis, yang mungkin merasa diserang tanpa sebab. Selain itu, ada risiko penggunaan ganda (*dual-use risk*), di mana rezim otoriter dapat menyalahgunakan teknologi yang sama untuk menargetkan negara lain atau kelompok terpinggirkan.⁶² Kelompok ekstremis juga mahir mengeksploitasi kerentanan AI, seperti melakukan *jailbreaking* pada sistem AI generatif untuk membuat propaganda.⁶²

Beberapa pihak berpendapat bahwa solusi teknologi saja tidak memadai untuk mengatasi ekstremisme, dan preferensi untuk solusi teknologi seringkali menunjukkan ideologi yang mengabaikan bahaya manusia yang sebenarnya.⁶⁹ Konten yang dihasilkan AI juga berisiko menyebarkan misinformasi, distorsi budaya, manipulasi psikologis, dan mengikis kebenaran serta kepercayaan, misalnya melalui khotbah sintesis atau "pseudo-prophecy" yang meniru wahyu ilahi.⁶¹ Hal ini menimbulkan kekhawatiran etis yang mendalam karena AI tidak memiliki Roh Kudus, iman, atau konteks eklesial yang esensial untuk pertumbuhan spiritual dan teologi.⁵⁹

Meskipun AI adalah alat yang diperlukan untuk menskalakan moderasi konten terhadap ekstremisme dan misinformasi, ia menghadirkan paradoks: bias dan keterbatasannya yang melekat dapat menyebabkan konsekuensi yang tidak diinginkan, seperti positif palsu yang menargetkan komunitas terpinggirkan atau ketidakmampuan untuk memahami ucapan yang bernuansa. Selain itu, hanya mengandalkan perbaikan teknologi berisiko mengabaikan akar ekstremisme yang lebih dalam, yaitu manusia dan ideologis. Implikasi etis meluas hingga penciptaan konten "sakral sintesis," yang dapat mendistorsi doktrin dan memanipulasi keyakinan, menyoroti batas-batas AI dalam domain yang membutuhkan kearifan spiritual sejati dan empati manusia. AI tidak boleh dianggap sebagai "obat mujarab." Moderasi konten yang efektif membutuhkan sinergi antara AI dan pengawasan manusia yang etis dan terlatih. Penting untuk mengembangkan AI yang transparan, akuntabel, dan adil, serta mendidik pengguna tentang keterbatasan AI, terutama dalam konteks keagamaan dan spiritual.

Bagian V

Rekomendasi dan Jalan ke Depan

Memahami agama sebagai simbol kelompok dan potensi AI dalam konteks pluralisme menggarisbawahi kompleksitas tantangan yang dihadapi masyarakat modern. Berdasarkan analisis di atas, beberapa rekomendasi dan jalan ke depan dapat dirumuskan untuk memperkuat pluralisme berbasis agama di era digital.

Strategi untuk Memperkuat Pluralisme Berbasis Agama

Reformasi Hukum dan Kebijakan

1. **Revisi PBM 9 dan 8 Tahun 2006:** Peraturan Bersama Menteri ini telah terbukti diskriminatif dan menjadi penghalang utama bagi kebebasan beragama minoritas dalam membangun rumah ibadah.⁴⁰ Pemerintah harus merevisi atau mencabut PBM ini, menggantinya dengan regulasi yang lebih inklusif dan non-diskriminatif yang benar-benar menjamin hak setiap warga negara untuk beribadah tanpa hambatan yang tidak proporsional.
2. **Penegakan Hukum yang Adil dan Tegas:** Kasus-kasus seperti GKI Yasmin dan persekusi Ahmadiyah menunjukkan kegagalan penegakan hukum yang konsisten, di mana keputusan pengadilan sering diabaikan oleh pejabat lokal di bawah tekanan kelompok mayoritas.⁴⁴ Pemerintah pusat harus menunjukkan kemauan politik yang kuat untuk menegakkan konstitusi dan hukum, menindak tegas pejabat yang memfasilitasi atau membiarkan intoleransi, serta memastikan keadilan bagi semua kelompok agama.
3. **Reformasi Undang-Undang Penistaan Agama:** Undang-undang penistaan agama seringkali disalahgunakan untuk menekan minoritas dan membungkam perbedaan pendapat, alih-alih melindungi kerukunan.³⁷ Perlu ada tinjauan ulang terhadap undang-undang ini untuk memastikan bahwa ia tidak menjadi alat diskriminasi dan bahwa kebebasan berekspresi yang bertanggung jawab tetap terjamin.
4. **Pengakuan Penuh Terhadap Aliran Kepercayaan:** Meskipun ada putusan Mahkamah Konstitusi yang mengizinkan pencantuman "kepercayaan" di KTP, stigma sosial dan kurangnya dukungan pemerintah masih menjadi tantangan bagi Penghayat Kepercayaan.⁵⁰ Pemerintah harus secara aktif mempromosikan pengakuan penuh dan inklusi mereka dalam semua aspek kehidupan publik, termasuk akses layanan, anggaran pengembangan, dan perlindungan dari diskriminasi.

Peran Aktif Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan Moderat

1. **Pemberdayaan Narasi Moderasi:** Organisasi seperti NU dan Muhammadiyah telah terbukti menjadi agen penting dalam mempromosikan Islam yang toleran dan inklusif.⁵² Pemerintah dan masyarakat sipil harus mendukung dan memperkuat peran mereka dalam menyebarkan narasi moderasi beragama, yang menekankan persatuan, kemanusiaan, dan kearifan lokal.
2. **Dialog Antar-Umat Beragama yang Terstruktur:** Mendorong dialog yang lebih mendalam dan terstruktur di antara berbagai kelompok agama, termasuk yang minoritas dan *aliran kepercayaan*. Dialog ini harus melampaui formalitas dan fokus pada pembangunan pemahaman, empati, dan kerja sama praktis dalam menghadapi tantangan bersama.

Literasi Digital dan Etika Media

1. **Pendidikan Literasi Media dan Kritis:** Masyarakat perlu dibekali dengan keterampilan literasi digital yang kuat untuk mengidentifikasi dan melawan misinformasi, ujaran kebencian, dan hoaks yang menyebar di media sosial.¹⁷ Pendidikan ini harus mencakup pemahaman tentang bias algoritma dan cara kerja ruang gema digital.
2. **Tanggung Jawab Platform Digital:** Platform media sosial harus bertanggung jawab lebih besar dalam memoderasi konten ekstremis dan ujaran kebencian. Ini termasuk investasi dalam teknologi AI yang lebih canggih dan adil, serta peningkatan pengawasan manusia yang terlatih untuk menangani konten yang bernuansa dan sensitif.
3. **Kampanye Kesadaran Publik:** Meluncurkan kampanye kesadaran publik yang berkelanjutan untuk mempromosikan nilai-nilai pluralisme, toleransi, dan saling menghormati di ruang digital, menantang narasi "kami vs. mereka" dengan menekankan kesamaan kemanusiaan.

Pemanfaatan AI secara Etis untuk Pluralisme

1. **Pengembangan AI yang Berpusat pada Manusia dan Pluralistik:** Desain AI harus secara proaktif mengintegrasikan keragaman nilai dan perspektif dari berbagai kelompok budaya dan agama sejak awal proses pengembangan.⁶³ Ini berarti melibatkan sosiolog, etikus, dan ahli budaya dalam tim pengembangan AI untuk memastikan sistem tidak memperkuat bias yang ada atau memaksakan pandangan dunia yang dominan.
2. **AI sebagai Alat Bantu, Bukan Pengganti:** Dalam konteks agama dan spiritualitas, AI harus dipandang sebagai alat bantu yang kuat untuk analisis teks, pembelajaran, dan personalisasi

praktik, tetapi tidak sebagai panduan spiritual atau otoritas moral yang sejati.⁵⁹ Penting untuk selalu menekankan bahwa AI tidak memiliki kesadaran, emosi, atau pengalaman transenden yang esensial bagi kehidupan spiritual manusia.

3. **Transparansi dan Akuntabilitas AI:** Pengembang dan penyedia layanan AI harus transparan tentang bagaimana sistem mereka dilatih, bagaimana keputusan dibuat, dan potensi bias yang mungkin ada. Mekanisme akuntabilitas harus ada untuk mengatasi kesalahan atau dampak negatif dari penggunaan AI, terutama dalam konteks yang sensitif seperti moderasi konten keagamaan.
4. **Penelitian Lintas Disiplin:** Mendorong penelitian lintas disiplin yang lebih mendalam tentang interaksi antara AI, agama, dan masyarakat. Ini termasuk studi tentang dampak psikologis dan sosial dari penggunaan AI dalam konteks keagamaan, serta eksplorasi potensi AI untuk memfasilitasi dialog antaragama berbasis data dan pemahaman bersama.

Dengan mengimplementasikan strategi-strategi ini, Indonesia dapat memperkuat fondasi pluralismenya, mengatasi tantangan intoleransi yang kompleks, dan memanfaatkan potensi teknologi baru seperti AI untuk membangun masyarakat yang lebih adil, harmonis, dan inklusif di era digital.

Daftar Pustaka

- Berger, Peter L. *The Sacred Canopy*. Anchor Books, 1967.
- Geertz, Clifford. *The Interpretation of Cultures*. Basic Books, 1973.
- Rawls, John. *Political Liberalism*. Columbia University Press, 1993.
- Harari, Yuval N. *Homo Deus*. Harper, 2017.
- Floridi, Luciano. *The Ethics of Information*. Oxford University Press, 2013.
- Habermas, Jürgen. *Religion and Rationality*. Polity Press, 2002.
- Armstrong, Karen. *The Case for God*. Knopf, 2009.
- Tillich, Paul. *The Courage to Be*. Yale University Press, 1952.
- Wahid Foundation Reports on Religious Freedom in Indonesia.
- Data Setara Institute, Komnas HAM, dan Human Rights Watch.

Glosarium

Istilah	Definisi Singkat
Pluralisme	Pandangan yang mengakui dan menghargai keberagaman keyakinan sebagai kekayaan sosial.
AI (Artificial Intelligence)	Kecerdasan buatan; kemampuan mesin untuk meniru kecerdasan manusia.

Istilah	Definisi Singkat
Etika Publik	Nilai-nilai moral yang disepakati dalam ruang publik lintas agama dan identitas.
Politik Identitas	Politik yang menjadikan identitas etnis, agama, atau kelompok sebagai basis utama perjuangan.
Spiritualitas Personal	Pencarian makna dan kedamaian batin secara pribadi tanpa terikat dogma institusional.
Bhinneka Tunggal Ika	Semboyan Indonesia yang berarti “Berbeda-beda tetapi tetap satu.”
Moderasi Beragama	Pendekatan yang mengedepankan sikap toleran, tidak ekstrem, dan menjunjung persaudaraan antariman.
Esoterik	Aspek batiniah atau terdalam dari agama yang bersifat personal dan kontemplatif.

Karya yang dikutip

1. Defining Religion Through the Lens of Peter Berger - Sociology Institute, diakses Agustus 5, 2025, <https://sociology.institute/sociology-of-religion/defining-religion-peter-berger-lens/>
2. Peter Berger – Religion as Establishing a “Sacred Cosmos”, diakses Agustus 5, 2025, <https://jamesbishopblog.com/2020/09/05/peter-berger-religion-as-establishing-a-sacred-cosmos/>
3. Religion and politics of belonging in digital times: youth religiosity in focus - Frontiers, diakses Agustus 5, 2025, <https://www.frontiersin.org/journals/political-science/articles/10.3389/fpos.2024.1476762/full>
4. Religion and populism - The Immanent Frame, diakses Agustus 5, 2025, <https://tif.ssrc.org/2016/09/27/religion-and-populism/>
5. The Sacred Canopy Summary - 1574 Words - Bartleby.com, diakses Agustus 5, 2025, <https://www.bartleby.com/essay/The-Sacred-Canopy-Summary-D8FD523F35B7F306>
6. Berger, Peter L. The Sacred Canopy: Elements of a Sociological Theory of Religion. New York - Plato, Crito, diakses Agustus 5, 2025, <https://www.lancasterlawoffice.com/wp-content/uploads/Berger-Sacred-Canopy-7.pdf>
7. sociology.institute, diakses Agustus 5, 2025, <https://sociology.institute/sociology-of-religion/clifford-geertz-religion-symbols-meanings/#:~:text=Geertz%20famously%20wrote%20that%20%E2%80%9Creligion,moods%20and%20motivations%20seem%20uniquely>
8. Clifford Geertz – Religion as a “System of Symbols”, diakses Agustus 5, 2025,

- <https://jamesbishopblog.com/2020/02/08/clifford-geertz-religion-as-a-system-of-symbols/>
9. en.wikipedia.org, diakses Agustus 5, 2025, https://en.wikipedia.org/wiki/The_Interpretation_of_Cultures#:~:text=Geertz's%20essays%20also%20explore,%2C%20puzzles%2C%20and%20paradoxes%20manageable.
 10. The Interpretation of Cultures - Wikipedia, diakses Agustus 5, 2025, https://en.wikipedia.org/wiki/The_Interpretation_of_Cultures
 11. Morality, Religious Symbolism, and the Creationist Movement, diakses Agustus 5, 2025, <https://ncse.ngo/morality-religious-symbolism-and-creationist-movement>
 12. Origins and Consequences of Religious Restrictions: A Global Overview - PMC, diakses Agustus 5, 2025, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4214927/>
 13. Religion, Culture, and Politics - Chapman University Digital Commons, diakses Agustus 5, 2025, https://digitalcommons.chapman.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1416&context=esi_working_papers
 14. Religion as a Means of Political Conformity and Obedience: From Critias to Thomas Hobbes, diakses Agustus 5, 2025, <https://www.mdpi.com/2077-1444/14/9/1180>
 15. The Weaponisation of Identity Politics – Legal Lens, diakses Agustus 5, 2025, <https://legallens.org.uk/the-weaponisation-of-identity-politics/>
 16. Identity Politics 2.0: Cyber Geopolitics and the Weaponization of Social Media, diakses Agustus 5, 2025, <https://arabcenterdc.org/resource/identity-politics-2-0-cyber-geopolitics-and-the-weaponization-of-social-media/>
 17. Peran Media dalam Penyebaran Intoleransi Agama - Jurnal, diakses Agustus 5, 2025, <https://jurnalptik.id/index.php/JIK/article/download/88/39>
 18. Rohini Pande in Science Magazine: “Identity politics” is economic policy, diakses Agustus 5, 2025, <https://egc.yale.edu/news/250116/rohini-pande-science-magazine-identity-politics-economic-policy>
 19. Millennials are abandoning organized religion. A new study ..., diakses Agustus 5, 2025, <https://www.psypost.org/millennials-are-abandoning-organized-religion-a-new-study-provides-insight-into-why/>
 20. Defensive religiosity as a factor in political polarization in the US - Bertelsmann Stiftung, diakses Agustus 5, 2025, https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/Projekte/51_Religionsmonitor/DZ_Religionsmonitor_Defensive_Religiosity_en.pdf
 21. The Consequences of Modernity by Anthony Giddens | Void Network, diakses Agustus 5, 2025, <https://voidnetwork.gr/wp-content/uploads/2016/10/The-Consequences-of-Modernity-by-Anthony-Giddens.pdf>
 22. Modernity and Self-Identity | Stanford University Press, diakses Agustus 5, 2025, <https://www.sup.org/books/sociology/modernity-and-self-identity>
 23. Modernity, Risk and Reflexivity: Anthony Giddens – Contemporary Social Theory, diakses Agustus 5, 2025, <https://ebooks.inflibnet.ac.in/socp2/chapter/modernity->

- [risk-and-reflexivity-anthony-giddens/](#)
24. Risk society - Wikipedia, diakses Agustus 5, 2025, https://en.wikipedia.org/wiki/Risk_society
 25. Religious Fundamentalism | Algor Cards, diakses Agustus 5, 2025, <https://cards.algoreducation.com/en/content/6RUUOoMQ/religious-fundamentalism-overview>
 26. THE CONCEPT OF FUNDAMENTALISM #1 - christos express - WordPress.com, diakses Agustus 5, 2025, <https://nikhilrajgupta.wordpress.com/2017/04/02/the-concept-of-fundamentalism-1/>
 27. The Coexistence of Faith and Reason: Habermas' Theoretical Framework of the Post-Secular Society - UI Scholars Hub, diakses Agustus 5, 2025, <https://scholarhub.ui.ac.id/mjs/vol27/iss2/19/>
 28. Habermas, Taylor, and Connolly on Secularism, Pluralism, and the Post-Secular Public Sphere - MDPI, diakses Agustus 5, 2025, <https://www.mdpi.com/2077-1444/10/8/460>
 29. John Rawls: Justice as fairness — DRZE, diakses Agustus 5, 2025, <https://www.drze.de/en/research-publications/in-focus/animal-experiments-in-research/modules/john-rawls-justice-as-fairness>
 30. John Rawls - Stanford Encyclopedia of Philosophy, diakses Agustus 5, 2025, <https://plato.stanford.edu/entries/rawls/>
 31. Political Liberalism - Wikipedia, diakses Agustus 5, 2025, https://en.wikipedia.org/wiki/Political_Liberalism
 32. Political liberalism, justice as fairness as (Chapter 159) - The Cambridge Rawls Lexicon, diakses Agustus 5, 2025, <https://www.cambridge.org/core/books/cambridge-rawls-lexicon/political-liberalism-justice-as-fairness-as/1FC8325EEF81B36B903BCC8CBEF18E5C>
 33. What does Levinas' encounter with the Other mean/imply? - Philosophy Stack Exchange, diakses Agustus 5, 2025, <https://philosophy.stackexchange.com/questions/115830/what-does-levinas-encounter-with-the-other-mean-imply>
 34. a critical analysis of Levinas' conception of "responsibility", diakses Agustus 5, 2025, <https://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/PPP668/%CE%97%20%CE%B5%CF%85%CE%B8%CF%8D%CE%BD%CE%B7%20%28%CE%9B%CE%B5%CE%B2%CE%B9%CE%BD%CE%AC%CF%82%29/Mkhwanazi%2C%20E.%2C%20To%20be%20human%20is%20to%20be%20responsible%20for%20the%20Other.%20A%20Critical%20Analysis%20of%20Levinas%27%20Conception%20of%20Responsibility.pdf>
 35. Bhinneka Tunggal Ika dan Integrasi Nasional - MPR RI, diakses Agustus 5, 2025, https://mpr.go.id/img/jurnal/file/240322_2014%20_%20Bhinneka%20Tunggal%20Ika%20dan%20Integrasi%20Nasional.pdf
 36. Bhinneka Tunggal Ika adalah Semboyan Bangsa Indonesia, Ini Makna dan Sejarahnya, diakses Agustus 5, 2025,

- <https://www.liputan6.com/feeds/read/5909524/bhinneka-tunggal-ika-adalah-semboyan-bangsa-indonesia-ini-makna-dan-sejarahnya>
37. 2020 Report on International Religious Freedom: Indonesia, diakses Agustus 5, 2025, <https://www.state.gov/reports/2020-report-on-international-religious-freedom/indonesia>
 38. 2019 Report on International Religious Freedom: Indonesia - U.S. Department of State, diakses Agustus 5, 2025, <https://www.state.gov/reports/2019-report-on-international-religious-freedom/indonesia>
 39. 2021 Report on international religious freedom: Indonesia - U.S. Department of State, diakses Agustus 5, 2025, <https://www.state.gov/reports/2021-report-on-international-religious-freedom/indonesia/>
 40. Religious freedom in Indonesia, diakses Agustus 5, 2025, <https://ijrf.org/index.php/home/article/download/67/83/88>
 41. ALIGNING PANCASILA VALUES IN THE REGULATION FOR WORSHIP HOUSE CONSTRUCTION IN INDONESIA - JDIH BPIP, diakses Agustus 5, 2025, <https://jdih.bpip.go.id/common/dokumen/5-136-kiftiyah-sutrisno-47-56.pdf>
 42. Evaluation of Joint Regulation of the Minister of Religion and Minister of Home Affairs No. 9 and 8 of 2006 - Jurnal Bina Praja, diakses Agustus 5, 2025, <https://jurnal.kemendagri.go.id/index.php/jbp/article/download/165/133/315>
 43. Penanaman Pendidikan Multikultural pada Masyarakat Melalui, diakses Agustus 5, 2025, https://www.researchgate.net/publication/329613351_Penanaman_Pendidikan_Multikultural_pada_Masyarakat_Melalui_Pendirian_Rumah_Ibadah_Bersama
 44. What the Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin Case Says about ..., diakses Agustus 5, 2025, https://www.iseas.edu.sg/wp-content/uploads/2023/08/ISEAS_Perspective_2023_70.pdf
 45. Indonesian GKI Church Service Sees Attack on House Members, diakses Agustus 5, 2025, <https://www.christianpost.com/news/indonesian-gki-church-service-sees-attack-on-house-members.html>
 46. Ahmadiyya in Indonesia - Wikipedia, diakses Agustus 5, 2025, https://en.wikipedia.org/wiki/Ahmadiyya_in_Indonesia
 47. Indonesia: Ahmadiyah Community Persecuted | Human Rights Watch, diakses Agustus 5, 2025, <https://www.hrw.org/news/2016/02/12/indonesia-ahmadiyah-community-persecuted>
 48. In Religion's Name: Abuses against Religious Minorities in ..., diakses Agustus 5, 2025, <https://reliefweb.int/report/indonesia/religion%E2%80%99s-name-abuses-against-religious-minorities-indonesia>
 49. INDONESIA - UPR info, diakses Agustus 5, 2025, https://upr-info.org/sites/default/files/documents/2017-05/unhcr_upr27_idn_e.pdf
 50. Emic Analysis Towards Penghayat Kepercayaan Dynamics in the ..., diakses Agustus 5, 2025, https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2018/48/e3sconf_icenis18_14016.pdf
 51. Dinamika Pengakuan Penghayat Kepercayaan di Indonesia | Viri | Indonesian

- Journal of Religion and Society - Lasigo Journals, diakses Agustus 5, 2025, <https://journal.lasigo.org/index.php/IJRS/article/view/119/0>
52. Kel 5 Peran Ormas Islam Dalam Moderasi Beragama Di Indonesia Real - Scribd, diakses Agustus 5, 2025, <https://id.scribd.com/document/538473634/KEL-5-PERAN-ORMAS-ISLAM-DALAM-MODERASI-BERAGAMA-DI-INDONESIA-REAL>
 53. Religion and American Politics: More Secular, More Evangelical...or Both? | Brookings, diakses Agustus 5, 2025, <https://www.brookings.edu/articles/religion-and-american-politics-more-secular-more-evangelical-or-both/>
 54. Report: Challenges in Advancing Religious Freedom in Digital ..., diakses Agustus 5, 2025, <https://engagemedia.org/projects/research-religious-freedom-indonesia/>
 55. Media Berperan Membangun Toleransi Umat Beragama - Kementerian Agama RI, diakses Agustus 5, 2025, <https://kemenag.go.id/read/media-berperan-membangun-toleransi-umat-beragama-x9lg>
 56. About - Luciano Floridi | Philosophy of Information, diakses Agustus 5, 2025, <https://www.philosophyofinformation.net/about/>
 57. Professor Luciano Floridi - OII - University of Oxford, diakses Agustus 5, 2025, <https://www.oii.ox.ac.uk/people/profiles/luciano-floridi/>
 58. The Ethics of Artificial Intelligence: Principles, Challenges, and Opportunities (Hardcover), diakses Agustus 5, 2025, <https://www.harvard.com/book/9780198883098>
 59. (PDF) AI and Religious Ethics: The Role of AI in Religious and ..., diakses Agustus 5, 2025, https://www.researchgate.net/publication/391634000_AI_and_Religious_Ethics_The_Role_of_AI_in_Religious_and_Spiritual_Contexts
 60. AI Meets Mindfulness: Redefining Spirituality and Meditation in the Digital Age, diakses Agustus 5, 2025, https://www.researchgate.net/publication/388388096_AI_Meets_Mindfulness_Redefining_Spirituality_and_Meditation_in_the_Digital_Age
 61. (PDF) The Misuse of AI-Generated Content in Academic and ..., diakses Agustus 5, 2025, https://www.researchgate.net/publication/392536823_The_Misuse_of_AI-Generated_Content_in_Academic_and_Religious_Settings
 62. Harnessing AI for Online P/CVE Efforts: Tools, Challenges, and Ethical Considerations, diakses Agustus 5, 2025, <https://gnet-research.org/2025/02/24/harnessing-ai-for-online-p-cve-efforts-tools-challenges-and-ethical-considerations/>
 63. Building AI for the pluralistic society - Google Research, diakses Agustus 5, 2025, <https://research.google/blog/building-ai-for-the-pluralistic-society/>
 64. AI, Pluralism, and (Social) Compensation - arXiv, diakses Agustus 5, 2025, <https://arxiv.org/html/2404.19256v2>
 65. EXPLORING AI TOOLS FOR ENHANCING BIBLICAL RESEARCH ..., diakses Agustus 5, 2025, <https://isrgpublishers.com/wp->

[content/uploads/2025/02/ISRGJAHSS9082025.pdf](#)

66. Using AI to Analyze Linguistic Patterns in Biblical Texts - FaithGPT, diakses Agustus 5, 2025, <https://www.faithgpt.io/blog/using-ai-to-analyze-linguistic-patterns-in-biblical-texts>
67. AI ChatGPT Reveals Truth: Is the Qur'an a Copy of the Bible? Quran ..., diakses Agustus 5, 2025, <https://www.youtube.com/watch?v=3nZORVXymgE&vl=en>
68. Christian AI Apps | Integrate Faith and Technology, diakses Agustus 5, 2025, <https://faith.tools/artificial-intelligence-ai>
69. Online Extremism, AI, and (Human) Content Moderation: Collateral Damage in Online Speech - Feminism, Social Justice, and AI, diakses Agustus 5, 2025, <https://feminism-social-justice-ai.org/online-extremism-ai-and-human-content-moderation-collateral-damage-in-online-speech/>



Profil Penulis

Dharma Leksana, S.Th., M.Si.

Adalah seorang teolog, wartawan senior, dan pegiat media digital gerejawi. Ia menyelesaikan pendidikan teologi di Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta, serta menempuh studi Magister Ilmu Sosial (M.Si) dengan fokus pada media dan masyarakat. Pengalaman panjangnya di bidang pewartaan dan pelayanan gereja telah membentuk komitmennya dalam membangun komunikasi iman yang kontekstual, transformatif, dan berbasis digital.

Dharma Leksana adalah **pendiri dan Ketua Umum Perkumpulan Wartawan Gereja Indonesia (PWGI)**, serta pendiri berbagai media digital Kristen, di antaranya:

- wartagereja.co.id
- beritaikoumene.com
- teologi.digital
- marturia.digital

dan puluhan media lainnya yang tergabung dalam **PT. Dharma Leksana Media Group (DHARMAEL)**, di mana ia menjabat sebagai **Komisaris**.

Ia juga menjabat sebagai:

- **Direktur PT. Berita Siber Indonesia Raya (PT BASERIN)**
- **Komisaris PT. Berita Kampus Mediatama**
- **Komisaris PT. Media Kantor Hukum Online**
- **Pendiri dan CEO Marketplace tokogereja.com**
- **Ketua Umum Yayasan Berita Siber Indonesia**
- **Direktur PT. Untuk Indonesia Seharusnya**

Sebagai pemikir dan pelaku, Dharma Leksana berkiprah sebagai jembatan antara dunia teologi, pewartaan digital, dan transformasi sosial. Ia aktif menulis buku, artikel, serta menjadi pembicara di berbagai forum gereja, media, dan akademik.